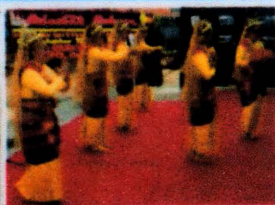


Zulkifli Harto

Batam : Eksistensi Kawasan Perbatasan

Editor :

Dra. Nurbaiti Usman Siam, M.Si



**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
TANJUNGPINANG 2012**

Oleh : Zulkifli Harto

**BATAM:
EKSISTENSI KAWASAN
PERBATASAN**

Editor :

Dra. Nurbaiti Usman Siam. M.Si

**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BALAI PELESTARIAN SEJARAH DAN NILAI
TRADISIONAL TANJUNGPINANG 2012**

**BATAM:
EKSISTENSI KAWASAN PERBATASAN**

Oleh :
Zulkifli Harto

Editor :
Dra. Nurbaiti Usman Siam. M.Si

Desain Cover :
@jiem

Tata Letak :
Milaz Grafika

Cetakan I,

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All righ reserved

Penerbit :
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional
Tanjungpinang 2012

ISBN : 978-979-1281-43-0

SAMBUTAN DIREKTUR TRADISI

DIIRINGI puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut gembira dengan diterbitkannya naskah hasil penelitian mengenai budaya di masyarakat yang berjudul Batam : Eksistensi Kawasan Perbatasan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional – Tanjungpinang. Tulisan ini dimaksudkan sebagai upaya melestarikan dan mengembangkan tradisi-tradisi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai diketahui bahwa era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tanpa disadari telah menyebabkan terjadinya pergeseran dan perubahan nilai-nilai tradisional. Sementara itu usaha untuk menggali, menyeleamatkan, memelihara, dan mengembangkan

warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam hal penerbitan. Oleh karena itu, penerbitan buku sebagai salah satu upaya untuk memperluas cakrawala budaya merupakan suatu usaha yang patut dihargai.

Walaupun tulisan ini masih merupakan tahap awal yang memerlukan penyempurnaan, akan tetapi dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan serta bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, tulisan ini perlu disebarluaskan kepada masyarakat luas, terutama di kalangan generasi muda.

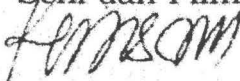
Mudah-mudahan dengan diterbitkannya naskah hasil penelitian ini dapat menjadi inspirasi untuk memperluas cakrawala budaya masyarakat dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan generasi sekarang dalam memahami keanekaragaman budaya masyarakatnya.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya naskah ini.

Jakarta, Juli 2012

Direktur Tradisi

Direktorat Jenderal Nilai Budaya,
Seni dan Film



Dra. Popy Savitri

NIP. 19591115 198 703 2 001

KATA PENGANTAR

PUJI dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya laporan penelitian Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Tanjungpinang ini telah dapat dijadikan buku dan diterbitkan.

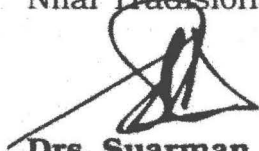
Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, BPSNT Tanjungpinang memiliki tugas utama melakukan penelitian kesejarahan dan budaya di wilayah kerjanya. Buku ini merupakan hasil penelitian sebagai rangkaian dari program inventarisasi dan dokumentasi yang bisa dipergunakan tidak hanya sebagai bahan rujukan dalam merumuskan kebijakan dalam bidang kebudayaan tetapi juga bagi masyarakat umum. Agar tujuan tercapai, maka sudah seharusnya hasil-hasil penelitian tersebut diterbitkan dalam

bentuk buku untuk disebarkan kepada masyarakat. Untuk itu, kegiatan penerbitan hasil-hasil penelitian menjadi kegiatan rutin BPSNT Tanjungpinang sebagai wujud komitmennya.

Tahun 2012 ini, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjungpinang menerbitkan delapan (8) judul buku dari hasil penelitian bidang kebudayaan yang dilakukan di empat provinsi yang menjadi wilayah kerja BPSNT Tanjungpinang, yaitu Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan Bangka Belitung. Salah satu penelitian tersebut adalah "Batam : Eksistensi Kawasan Perbatasan".

Dengan terbitnya buku ini, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan. Semoga buku yang telah diterbitkan ini dapat berguna bagi masyarakat.

Tanjungpinang, Oktober 2012
Kepala
Balai Pelestarian Sejarah dan
Nilai Tradisional Tanjungpinang



Drs. Suarman

NIP. 19630101 199103 1001

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Direktur Tradisi	iii
Kata Pengantar	v
Daftar isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	12
3. Tujuan	13
4. Ruang Lingkup	14
5. Metode	14
6. Jadwal Kegiatan	16
BAB II GAMBARAN UMUM	14
1. Letak dan Keadaan Alam	14
2. Kependudukan	32
BAB III EKSISTENSI BATAM	35
1. Kebijakan dan Peraturan Pemerintah Berkaitan dengan Batam	35
2. Sejarah dan Perkembangan Pulau Batam .	39
3. Kondisi Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pemerintahan	52
A. Bidang Ekonomi	54
B. Bidang Sosial Budaya	62
C. Bidang Pemerintahan	70
BAB IV POTENSI DAN PERMASALAHANNYA .	77
BAB VI PENUTUP	97
1. Kesimpulan	97

2. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
DAFTAR INFORMAN	103

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki wilayah yang sangat luas dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, diperkirakan memiliki 17.508 pulau tersebar dalam wilayahnya. Wilayah NKRI terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jika seluruh wilayah tersebut digabungkan menjadi satu, maka luas NKRI mencapai 1.9 juta mil persegi. Selain wilayah yang luas, letaknya juga sangat strategis sebagai salah satu jalur perlintasan dunia. Secara geografis terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia/Oceania.

Wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara, baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Dalam bapenas.go.id disebutkan bahwa, batas darat

wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara seperti; Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat Provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda bila ditinjau dari segi kondisi sosial, ekonomi, politik maupun budayanya. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Wilayah perbatasan-laut pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga.

Lebih lanjut, Tarmansyah (2009) menyebutkan, bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara maritim telah mendapatkan pengukuhan statusnya dengan Hukum Laut Internasional 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982*). Dengan demikian NKRI telah mendapat jaminan atas hak-haknya sebagai negara maritim, namun juga dituntut untuk melak-

sanakan kewajiban dan tanggungjawabnya di laut terhadap dunia (pelayaran) Internasional. Berkah yang diberikan UNCLOS 1982 ini sepatutnya kita syukuri, karena Indonesia-lah negara yang paling diuntungkan, mengingat NKRI adalah negara maritim yang memiliki wilayah perairan terluas, lebih luas dari wilayah daratan (3x luas daratan: luas daratan 2.027 km², luas perairan 6.184.280 km²) 1 UNCLOS 1982 merupakan Hukum dasar/pokok di bidang kelautan telah mengatur rejim-rejim hukum laut yang selama + 25 tahun diperjuangkan Indonesia, yaitu ketentuan-ketentuan tentang: perairan pedalaman (*inland waters*), perairan kepulauan (*Archipelagic waters*), laut wilayah/teritorial (*Territorial waters*), landas kontinen (*Continental Shelf*), zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan zona tambahan. Dalam UNCLOS tersebut memuat ketentuan/ peraturan tentang bagaimana menentukan titik pangkal (*base points*), garis pangkal (*base lines*) dan ketentuan jarak serta cara-cara penentuan setiap rejim perairan. Sebagai konsekwensi dari adanya rejim Hukum Laut Internasional (HLI), Indonesia dihadapkan pada beban tugas yang berat yaitu mengelaborasi dan menjabarkan HLI ini untuk kepentingan sendiri dan untuk pengaturan lalulintas laut internasional yang cukup padat (karena

kedudukan wilayah NKRI yang strategis) serta melaksanakan perundingan dengan negara-negara tetangga untuk menentukan batas perairan, semua itu perlu dilakukan dalam rangka penegakan wilayah kedaulatan NKRI. Beratnya permasalahan dan kemampuan yang Terbatas. Sudah seperempat abad UNCLOS 1982 diberlakukan, tetapi belum begitu banyak tugas-tugas tersebut di atas telah kita rampungkan. Masalahnya adalah, kita tidak memiliki ahli hukum laut yang cukup dan anggaran/finansial yang sangat terbatas, padahal tugas-tugas tersebut memerlukan biaya sangat besar.

Berkaitan dengan wilayah perbatasan, akhir-akhir ini hangat dibicarakan disebabkan berbagai hal, diantaranya klaim masing-masing negara terhadap suatu wilayah, baik wilayah darat maupun wilayah laut. Masing-masing pihak menganggap merekalah yang paling berhak terhadap suatu kawasan atau daerah. Hal itu terkadang menjadi kemelut yang berkepanjangan dan hangat dibicarakan diberbagai kesempatan oleh masing-masing pihak. walaupun kemelut tersebut belum sampai pada tingkat pertikaian secara langsung. Namun, setiap saat pertikaian dapat saja terjadi sebagai dampak dari permasalahan perbatasan yang terkesan tak kunjung

selesai diantara pihak-pihak yang bersengketa. Perbatasan negara merupakan sebuah ruang geografis yang sejak awal telah menjadi wilayah perebutan kekuasaan antar negara, hal itu dapat dilihat dengan adanya dinamika pertarungan untuk memperluas/memperpanjang garis batas negaranya. Sehingga tidak mengherankan selalu terjadi penangkapan di wilayah ini, bukan hanya karena ketidaktahuan batas oleh pihak yang bersalah tetapi lebih dikarenakan patokan batas antar negara yang tidak pernah jelas penempatannya.

Secara umum, kehidupan berbangsa dan bernegara antara negara yang bertetanggaaan dengan Indonesia dapat dikatakan berjalan rukun dan harmonis, walau terkadang sering terjadi “riak-riak kecil” yang dapat memicu berbagai potensi konflik antara negara bertetanggaaan disebabkan oleh permasalahan perbatasan antar negara yang tak kunjung selesai. Sehingga akibat dari permasalahan itu dikhawatirkan terjadi kesalah-fahaman dan salah pengertian bagi petugas penjaga perbatasan di lapangan, seperti yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu terhadap petugas DKP Indonesia dengan Polisi Diraja Malaysia. Hal itu tidak lain akibat dari permasalahan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia.

Kondisi tersebut memperlihatkan betapa berbeda-beda perlakuan masing-masing pemerintah terhadap wilayah perbatasannya. Hal itu tentu menimbulkan dampak yang berbeda bagi masing-masing negara. Sebagai contoh, Negara Malaysia dengan upaya yang lebih serius dalam menangani wilayah perbatasan dapat menjaga berbagai kemungkinan buruk akibat berbagai aktivitas yang terjadi di wilayah perbatasannya, sedangkan bagi pemerintah Indonesia terasa hal ini seakan sulit dicapai. Seakan dilakukan pembiaran bagi wilayah perbatasannya kecuali jika terjadi riak-riak yang berdampak hingga mengganggu stabilitas nasional atau hubungan antar negara. Kondisi tersebut tentu menjadi suatu hal yang sangat memperhatikan.

Batas suatu negara merupakan wujud dari kedaulatan wilayah suatu negara sesuai dengan memorandum/undang-undang pembentuk negara tersebut. Perbatasan suatu negara memiliki peranan penting dalam penentuan wilayah kedaulatannya. Hal itu guna menghindari berbagai dampak akibat ketidakjelasan dari permasalahan perbatasan antar negara, apalagi masalah perbatasan menyangkut hal-hal penting seperti: pemanfaatan sumber daya alam, pen-
jagaan keamanan guna mempertahankan keutuhan

wilayah, dan kesejahteraan masyarakat disekitarnya.

Suatu negara tidak terbentuk begitu saja tanpa batas yang jelas karena terbentuknya negara tidaklah terjadi begitu saja secara alami tetapi merupakan hasil usaha yang diperoleh melalui perjuangan yang mengorbankan air mata dan darah dari para pendahulunya. Persoalan penentuan perbatasan suatu negara dalam banyak hal ditentukan oleh berbagai proses yang tidak gampang, seperti proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. Namun bagaimanapun prosesnya, sebenarnya batas negara sudah jelas tercantum dalam konstitusi dan tercantum pula dalam penentuan batas wilayah negara. Jadi seharusnya permasalahan perbatasan secara geografis tidak perlu dipermasalahkan lagi karena sudah jelas tertulis dalam konstitusi pembentuk negara khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Persoalan yang melingkupi wilayah di perbatasan tidak selalu berkaitan dengan negara tetangga. Apalagi permasalahan batas geografis dengan negara tetangga telah selesai, maka apakah persoalan daerah perbatasan juga dapat dikatakan selesai? Apakah tanggung jawab negara telah tuntas? Tentunya banyak pertanyaan yang dapat dilontarkan dan

seharusnya setiap pertanyaan memerlukan jawaban untuk menjawab perlu pertanyaan penelitian mendalam agar hasil yang diperoleh merupakan jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Setelah suatu daerah perbatasan menjadi milik sah negara, bukan berarti persoalan telah selesai, justru perjuangan yang lebih besar telah menanti. Misalnya bagaimana strategi yang dilakukan bagi daerah perbatasan tersebut agar tidak tertinggal dengan daerah lainnya. Bagaimana menjaga daerah perbatasan agar sumber daya alamnya tidak dikuras oleh bangsa lain? Serta bagaimana mensejahterakan masyarakat sekitarnya?.

Berbagai wilayah daerah perbatasan di Indonesia, memiliki beberapa pokok permasalahan antara lain:

- a) Umumnya berupa wilayah pedalaman dengan ketersediaan infrastruktur transportasi yang sangat minim.
- b) Garis batas wilayah negara masih belum jelas.
- c) Akses informasi sangat minim (tidak terjangkau), sementara akses informasi negara tetangga relatif lebih baik.
- d) Sebagai pintu gerbang negara yang memberi akses langsung ke luar negeri namun kurang mendapat perhatian dalam pengembangan dan pembangunannya.

Wilayah-wilayah perbatasan atau sering juga disebut sebagai pulau terluar merupakan wilayah yang sama pentingnya bahkan lebih penting karena menyangkut berbagai hal khususnya berkaitan dengan keamanan dan keutuhan wilayah. Oleh sebab itu, pembangunan wilayah-wilayah di daerah perbatasan perlu direncanakan dengan matang dan sesuai dengan karakteristik wilayahnya agar masyarakat yang menetap di daerah tersebut diharapkan dapat merasakan manfaatnya.

Pembangunan wilayah perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Namun, kelebihan dan potensi wilayah perbatasan adalah memiliki nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan secara nasional. Oleh sebab itu, strategi pembangunan wilayah perbatasan perlu perencanaan yang matang agar wilayah perbatasan khususnya yang jauh dari pusat pemerintahan harus dapat diberdayakan dan dibangun semaksimal mungkin.

Berbagai istilah pernah ditabalkan guna menyebut daerah yang berada pada lingkaran perbatasan negara seperti: wilayah perbatasan, beranda terdepan bangsa, pulau terluar, dan pulau terdepan. Namun, apapun istilah yang ditabalkan bukanlah hal itu yang

menjadi pokok utama yang dibutuhkan oleh kawasan diperbatasan tetapi bagaimana memberdayakan dan memperhatikan daerah-daerah diperbatasan agar dapat maju minimal tidak terlalu tertinggal dengan daerah “di sebelahnya”. Tentu bukan suatu pekerjaan mudah namun perencanaan yang matang dan strategi yang tepat tentu akan dapat memacu perkembangan wilayah-wilayah yang berada di daerah perbatasan.

Berbicara mengenai perbatasan, maka akan menyentuh banyak persoalan yang sulit dibatasi pada satu bidang permasalahan. Perbatasan memperoleh makna yang sangat luas sebagai konstruksi sosial dan kultural yang tidak hanya terikat pada pengertian yang bersifat teritorial. Sehingga jika ingin membicarakan masalah perbatasan maka akan sangat menarik untuk dikaji karena luasnya materi kajian yang melingkupi berbagai bidang yang berkaitan dengan permasalahan kajian perbatasan. Namun untuk menghasilkan suatu penelitian yang baik harus membatasi permasalahan kajiannya agar hasil yang diperoleh dapat lebih fokus pada satu persoalan.

Umumnya kesan yang diperoleh terhadap satu kawasan yang merupakan daerah perbatasan atau pulau terluar biasanya adalah ketertinggalan/daerah tertinggal dan jauh dari pusat pemerintahan serta

kurang diperhatikan. Kesan yang diperoleh itu dapat dimaklumi karena jika dilihat secara umum terhadap berbagai daerah perbatasan di Indonesia terkesan kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Selama ini perhatian yang diberikan lebih sebatas rencana dan wacana namun implementasi di lapangan berbeda jauh dari harapan yang selalu “digembargemborkan” oleh para elit politik dan pejabat birokrasi negeri ini. Namun harus diakui bahwa tidak semua daerah perbatasan mengalami nasib seperti tersebut di atas, karena ada juga daerah perbatasan yang mengalami kemajuan pembangunan bahkan dapat dikatakan bahwa daerah perbatasan tersebut telah menjelma menjadi suatu kawasan metropolitan baru dan mampu mendorong daerahnya sebagai daerah investasi berskala nasional dan internasional. Adapun daerah perbatasan yang telah menjelma menjadi kawasan metropolitan tersebut adalah Kota Batam.

Wilayah kepulauan yang berada dalam kawasan Kota Batam letaknya sangat strategis dan berbatasan dengan negara Singapura sebagai pusat ekonomi Asia. Kota Batam merupakan daerah yang berada dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis Kota Batam mempunyai posisi yang strategis karena berada pada jalur pelayaran internasional dan hanya berjarak

12,5 mil laut dengan negara Singapura. Hal ini menempatkan wilayah Batam sebagai salah satu pintu gerbang di Kawasan Barat Indonesia.

Batam, sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga tentu saja menjadikan daerah ini sebagai daerah yang sangat strategis dan menarik, tidak hanya dalam bidang ekonomi dan politik tetapi juga bidang sosial budaya. Kesemuanya itu menjadi potensi yang sangat luar biasa jika dikelola dengan baik, guna memacu dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan tidak hanya bagi kepentingan Batam tetapi diharapkan dapat memberikan nilai positif guna merangsang pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh bagi bangsa Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu dilakukan pendataan dan penelitian berkaitan dengan wilayah perbatasan khususnya yang menyangkut eksistensi wilayah perbatasan. Oleh sebab itu, maka pada pendataan dan penelitian kali ini mengambil judul “**Batam: Eksistensi Kawasan Perbatasan**”.

2. Dasar Hukum

1. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran BPSNT NO.

0022/040-03.2/IV/2010 tanggal 31 Desember 2009.

2. UU RI No. 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Perpres No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Tata Kerja Kementerian Negara.
4. Kepres RI No. 17 Tahun 2000 dan No. 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara.
5. Permen Budpar No. PM. 38/OT.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja DEPBUDPAR.
6. Permen Budpar No. PM. 38/OT.001/MKP-2000 tanggal 7 September 2006 tentang Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPSNT.
7. Renstra Program BPSNT Tanjungpinang tahun 2010 – 2014.
8. Program BPSNT Tanjungpinang tahun 2010

3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendiskripsikan dan mengungkapkan keberadaan wilayah Kota Batam sebagai daerah perbatasan khususnya berkaitan dengan eksistensinya sebagai daerah perbatasan. Diharapkan hasil akhir dari

penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam rangka menentukan arah kebijakan ke depan baik oleh pemerintah daerah maupun pusat.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

Hasil akhir dari penelitian ini berupa bentuk laporan tulisan hasil penelitian tentang daerah perbatasan di Kota Batam. Oleh sebab itu, lingkup penelitian ini adalah wilayah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau khususnya yang berkaitan dengan potensi dan eksistensi wilayah tersebut sebagai salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang teliti dengan menggambarkan/melukiskan keadaan/objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dengan menggunakan metode ini, masalah dan fakta-fakta yang diperoleh dilapangan dapat lebih diketahui secara mendalam dan akan dideskripsikan dalam laporan penelitian ini. Metode ini juga akan memberikan hasil data yang lebih lengkap, sehingga tujuan penelitian ini dapat

dicapai.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan, dan wawancara yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, serta data-data gambar yang diperoleh langsung dari objek maupun dari sumber lainnya. Wawancara dengan teknik bebas tidak berstruktur, namun tetap berusaha membuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan lingkup penelitian ini. Demikian juga halnya dengan pengamatan yang dilakukan, diupayakan tetap berusaha melakukan pengamatan seobjektif mungkin guna memperoleh hasil yang baik.

Sumber data dalam bentuk wawancara dilakukan kepada orang-orang tertentu yang mengetahui atau berhadapan langsung dengan objek penelitian serta masyarakat pendukungnya. Selain itu, untuk lebih melengkapi data yang diperoleh juga dilakukan studi pustaka serta menelusuri berbagai situs di internet untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

6. Jadwal Waktu Pelaksanaan

No.	Uraian	Jadwal		
		Agustus	September	Oktober
1	Pengumpulan Data	=====		
2	Pengolahan Data		=====	
3	Pembuatan Laporan			=====
4	Penyerahan Laporan			=====

BAB II

GAMBARAN UMUM

1. Letak dan Keadaan Alam

Secara administrasi Kota Batam berada dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi ini termasuk salah satu provinsi baru di Indonesia. Namun, walau merupakan provinsi baru tetapi kemajuan dan keberadaan daerah ini telah banyak mewarnai dinamika pembangunan secara nasional. Hal ini, tentu tidak terlepas dari dukungan dan keberadaan Kota Batam sebagai salah satu wilayahnya. Tanpa Batam mungkin daerah Kepulauan Riau akan menjadi daerah tertinggal baru yang dibentuk pemerintah. Hal itu bukan tanpa alasan, karena berbagai fasilitas dan sarana yang dimiliki Batam telah memberikan dukungan tersendiri dalam mendorong kemajuan daerah sekitarnya. Walau Batam bukan merupakan pusat pemerintahan provinsi tetapi daerah ini merupakan pintu gerbang Provinsi Kepulauan Riau. Oleh sebab itu, daerah ini menjadi begitu penting mungkin bukan hanya bagi pemerintahan provinsi tetapi bagi kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan nasional. Apalagi daerah

ini merupakan daerah perbatasan negara yang sangat strategis.

Secara umum keberadaan Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah 251,810,71 km yang sebagian besar yakni 95,97 persen atau 241.251,30 km merupakan perairan. Sedangkan daratan hanya 4,21 persen terdiri dari gugusan kepulauan sebanyak 1.062 pulau. Potensi kelautan daerah ini memiliki kekayaan yang sangat berlimpah seperti; pasir, timah, minyak bumi, perikanan, dan bidang kepariwisataan maritim.

Sebelumnya, wilayah provinsi Kepulauan Riau hanya merupakan satu daerah yang berstatus daerah tingkat II kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Riau yang masuk dalam wilayah Provinsi Riau. Setelah terbentuknya daerah ini menjadi daerah provinsi baru, berdasarkan UU No. 25 Tahun 2002 tentu banyak hal yang harus dilakukan untuk penataan dan pengelolaan daerahnya, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, demikian juga melengkapi berbagai sarana dan prasarannya. Saat ini Provinsi Riau secara administrasi memiliki 7 daerah otonomi kota dan kabupaten, yaitu; Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan

Kabupaten Anambas. Sebagian besar daerah kota dan kabupaten yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau tersebut secara administrasi merupakan daerah baru seiring dengan dibentuknya provinsi ini. Namun walaupun secara administrasi merupakan daerah baru tetapi eksistensi dan keberadaannya telah banyak memberikan warna bagi pembangunan daerah ini dan pembangunan secara nasional. Salah satu daerah yang paling menonjol peranannya dalam mendorong perkembangan daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah Kota Batam.

Sebelum terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau daerah Batam telah tumbuh dan berkembang dengan pesat, seakan mengejar ketertinggalannya dengan pulau di seberangnya yang merupakan negara tetangga yaitu Singapura. Laju pembangunan daerah ini telah dirintis sejak awal tahun 70-an, masa itu, pemerintah pusat melihat bahwa potensi pulau Batam sebagai daerah perbatasan memiliki potensi besar jika dikembangkan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi.

Apa yang menjadi keinginan pemerintah pusat pada masa itu telah memberikan warna tersendiri bagi perkembangan daerah ini selanjutnya, walau kemajuan yang dicapai belum menyamai negeri tetangga

Singapura, tetapi kemajuan dan pembangunan daerah telah memberikan nilai positif dalam pembangunan daerah ini dan merangsang pembangunan daerah sekitarnya dan Indonesia secara umum.

Keberhasilan pembangunan daerah Batam telah dikenal secara luas sehingga tidak mengherankan jika nama "Batam" sudah tidak asing lagi, tidak hanya bagi kalangan nasional tetapi hingga ke mancanegara. Hal itu dikarenakan keberadaan, potensi dan posisi daerah ini yang sangat strategis. Ditambah lagi dengan dukungan dari pemerintah pusat sejak awal dibukanya daerah ini dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat tumbuh sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Barat Indonesia.

Keinginan pemerintah pusat pada waktu itu untuk pembangunan daerah Batam memang cukup beralasan karena posisi Kota Batam sangat strategis yang berada pada jalur pelayaran internasional dan berbatasan dengan negara tetangga Singapura, jaraknya sangat dekat hanya sekitar 12,5 mil laut. Jarak yang dekat tersebut tentu saja memberikan dampak tersendiri bagi daerah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apalagi sebagai daerah perbatasan daerah ini memiliki kedekatan historis dan geografis dengan negara tetangganya.

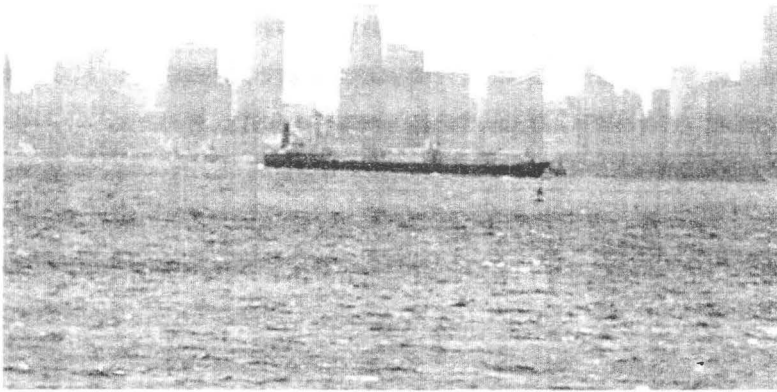
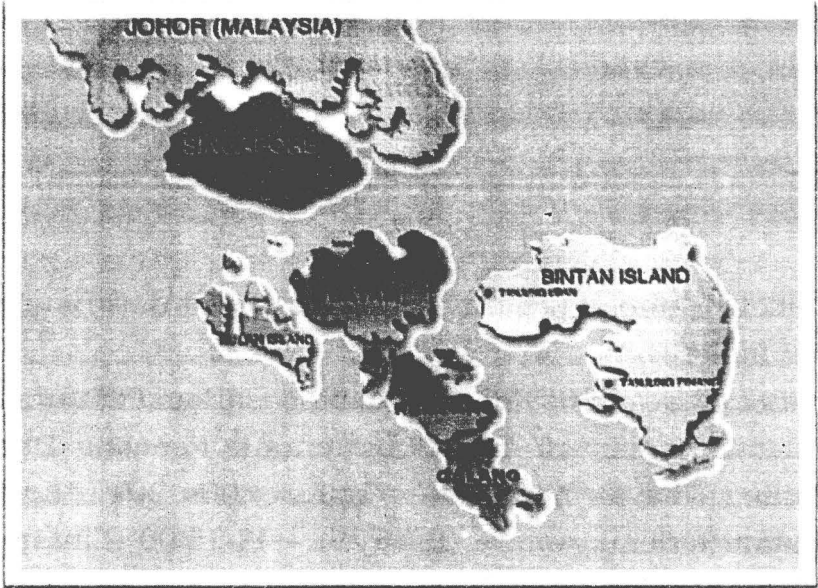


Foto: tampak negara Singapura dilihat dari Batam

Secara geografis Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014, Kota Batam terletak antara $0^{\circ} 25'29''$ – $1^{\circ} 15'00''$ Lintang Utara dan $103^{\circ} 34'35''$ – $104^{\circ} 26'04''$ Bujur Timur. Luas daerah ini secara keseluruhan adalah 3.990,00 km², terdiri dari luas wilayah darat 1.040 km² dan luas wilayah laut 2.950 km. Pulau-pulau yang termasuk dalam jajaran wilayah Kota Batam cukup banyak, tidak kurang dari $\pm$ 400 buah pulau, 329

pulau diantaranya telah bernama, sisanya belum bernama. Pulau terbesar dalam jajaran pulau-pulau daerah ini adalah Pulau Batam, nama pulau ini pulalah yang kemudian dijadikan nama administrasi daerah ini yaitu Kota Batam. Beberapa buah pulau dalam wilayah ini termasuk dalam kategori pulau terluar di wilayah perbatasan negara.



Peta: Wilayah Batam (sumber: Bapeko Batam)

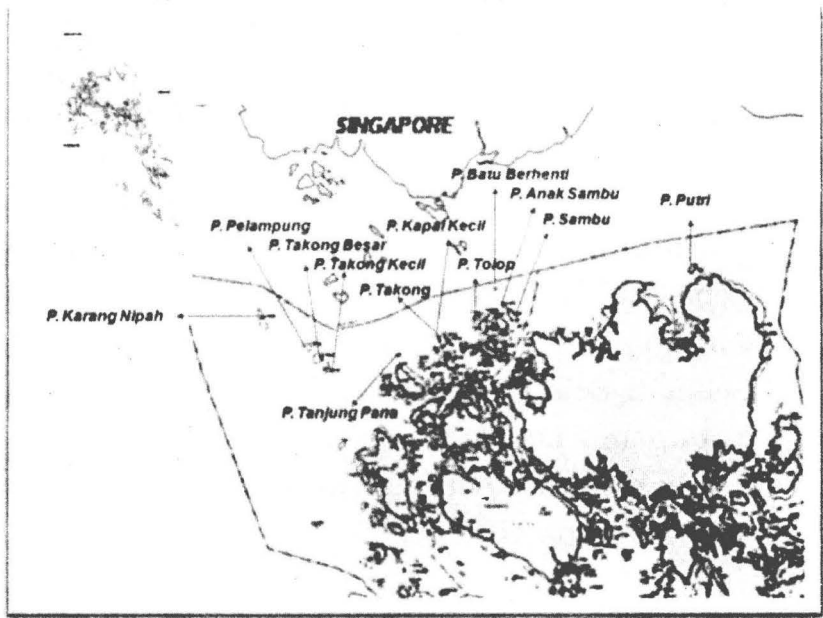
Sebagaimana telah disebutkan bahwa daerah ini secara administratif merupakan bagian dari Propinsi Kepulauan Riau, batas-batas daerahnya berbatasan

dengan 1 negara, 3 kabupaten dan 1 kota yaitu negara Singapura, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang. Lebih jelasnya batas wilayah Kota Batam dapat dilihat di bawah ini, yaitu:

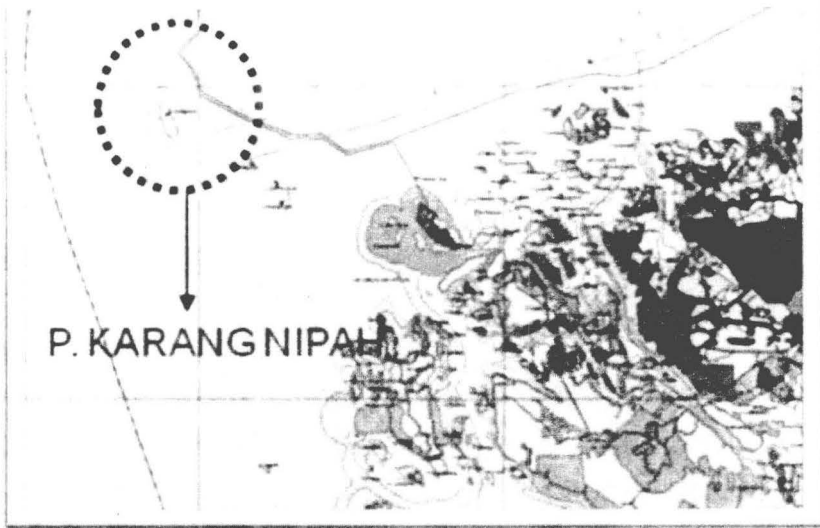
- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Singapura
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bintan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Senayang Kabupaten Lingga
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Moro Kabupaten Karimun.

Sebagai wilayah kepulauan di perbatasan, posisi wilayah Batam yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, memiliki arti penting dalam pembangunannya. Namun strategi pembangunan di wilayah kepulauan tentu akan berbeda dengan wilayah daratan umumnya. Apalagi wilayahnya terdapat pulau-pulau kecil yang memiliki posisi sangat strategis sebagai wilayah perbatasan antar negara. Beberapa di antaranya termasuk dalam daftar “pulau terluar” atau istilah lainnya “pulau terdepan” yang terdapat dalam wilayah Kota Batam, seperti pada

gambar di bawah ini:



Peta: wilayah perbatasan di Batam
(sumber: Bapeko Batam)



Peta: Letak Pulau Karang Nipah di perbatasan
(sumber: Bapeko Kota Batam)

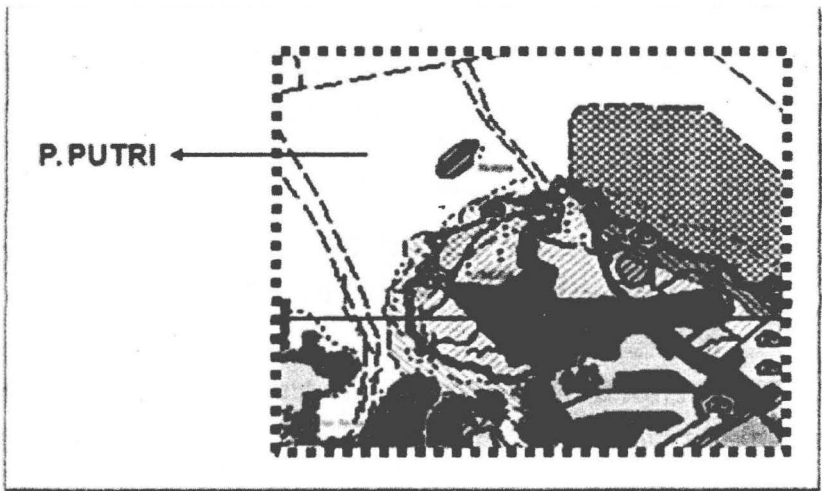
Pulau Nipah terletak di antara Selat Philip dan selat utama (*main strait*), yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura. Posisi Pulau Nipah terletak di koordinat: 103 39'04.68" - 103 39' 39.384" BT dan 1 8' 26.88" - 1 9' 12.204" LU. Daratannya datar dan berbentuk lonjong berarah Barat Laut.

Luas wilayah, berdasarkan data Bapeko Kota Batam:

- 63 Ha (*lowest water surface*), panjang garis pantai 3,96 km, sumbu panjang 1,6 km dan sumbu lebar

sekitar 0,4 km;

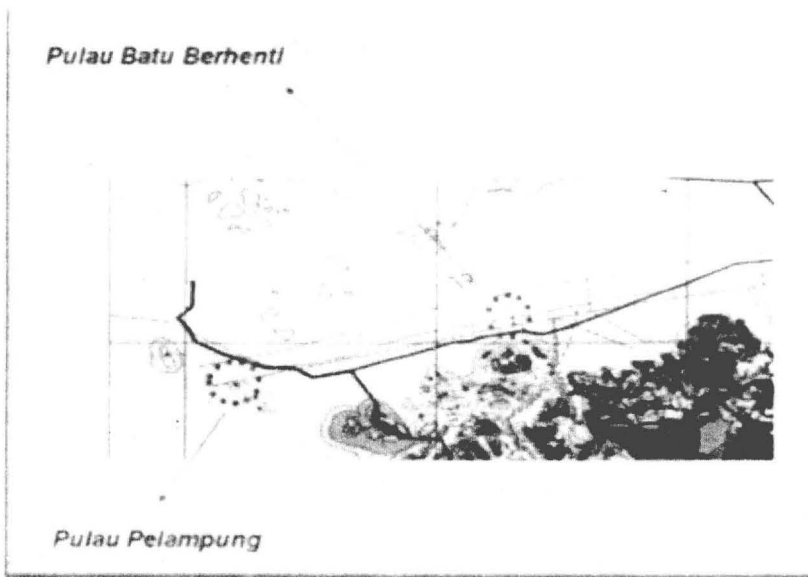
- 58 Ha (mean sea level);
- 28 Ha (*highest water surface*), ketinggian gelombang sekitar 2 m, hanya beberapa tonjolan singkapan batuan metasedimen seluas 1 ha serta beberapa pohon bakau dan mercusuar yang terlihat.



Peta: letak Pulau Putri di perbatasan
(sumber: Bapeko Kota Batam)

Pulau Putri atau yang biasa juga dikenal dengan nama Pulau Nongsa terletak di antara Selat Philip dan selat utama (*main strait*), yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura.

Luas wilayah : $\pm$ 51 Ha. Kegiatan yang dilakukan pada daerah perbatasan ini adalah; Rehab Menara Suar dan Fasilitas Penunjang seperti reklamasi, rehab suar yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas I Tanjungpinang.

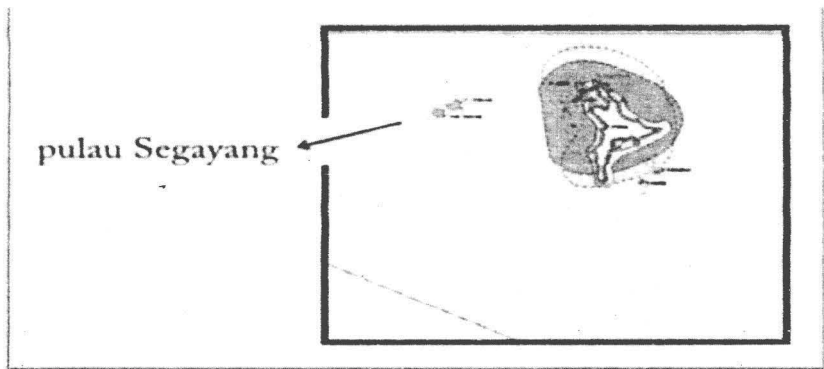


(sumber: Bapeko Kota Batam)

Pulau Batu Berhenti terletak di antara Selat Philip dan selat utama (*main strait*), yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura, dengan

luas wilayah $\pm 8,3$ Ha. Pada Pulau ini telah dibangun Tugu NKRI

Sedangkan pulau Pelampung terletak di antara Selat Philip dan selat utama (*main strait*), yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura, dengan luas wilayah $\pm 57,7$ Ha Pada Pulau ini telah dibangun Tugu NKRI



Peta: pulau Segayang di perbatasan (sumber: Bapeko Kota Batam)

Pulau Segayang terletak di Perairan sebelah Barat Daya Kota Batam. Jarak tempuh ke lokasi dari Jembatan V Barelang ± 45 menit. Luas wilayahnya 11,4 ha. Kegiatan yang terdapat di Pulau Segayang saat ini adalah Resort yang dikelola oleh PT. Allamanda Resort (Sebelumnya dikenal dengan nama *Coral Cove*

Island Resort) yang merupakan pengembangan Wisata Alam dan Bahari

Jajaran pulau-pulau dalam wilayah Kota Batam pada umumnya merupakan sisa-sisa erosi atau pencetusan dari daratan pra tersier yang membentang dari semenanjung Malaysia dari bagian Utara sampai dengan pulau-pulau Moro, Kundur serta Karimun di bagian Selatan. Keadaan tanahnya dapat digolongkan datar dengan variasi berbukit-bukit berbatu muda dengan ketinggian maksimum 160 meter dpl (di atas permukaan laut). Dialiri banyak sungai-sungai kecil dan dikelilingi hutan-hutan serta semak belukar. Namun dalam perkembangan saat ini, hutan-hutan tersebut sudah kelihatan banyak yang gundul dan rata disebabkan banyaknya daerah yang bakal dibangun oleh investor yang menanamkan modalnya di daerah tersebut baik untuk perumahan maupun kawasan industri. Sebagai daerah investasi yang berskala internasional maka permasalahan pelestarian hutan dan pembangunan kawasan menjadi dilema, untuk itu perlu strategi pengembangan kawasan yang matang dengan tetap mempertimbangkan pelestarian hutan dan kawasan penduduknya.

Keberadaan perairan dan perikanan di kawasan ini tergolong sangat berpotensi karena wilayahnya

merupakan wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia sehingga menjadikan perairan di daerah ini tergolong cukup subur bagi kehidupan perikanan dan biota lainnya karena dilihat dari perputaran arus perairan daerah ini, ekosistem perikanan yang dipengaruhi oleh gerakan air yang berasal dari Samudra Hindia yang melewati Selat Malaka dan gerakan arus yang berasal dari Laut Cina Selatan. Ekosistem laut yang demikian bervariasi memberikan dampak tersendiri terhadap keberadaan kekayaan alam laut daerah ini.

Kota Batam beriklim tropis dengan suhu minimum pada tahun 2008 berkisar antara 20,0 °C – 27,1 °C dan suhu maksimum berkisar antara 31,7 °C - 33,4 °C, sedangkan suhu rata-rata sepanjang tahun 2008 adalah 20,4 °C - 27,4 °C. Keadaan tekanan udara rata-rata untuk tahun 2008 minimum 1001,1 MBS dan maksimum 1014,4 MBS. Sementara kelembaban udara di Kota Batam rata-rata berkisar antara 79 – 86 %. Kecepatan angin maksimum 15 - 30 knot. Banyaknya hari hujan selama setahun di Kota Batam pada tahun 2008 adalah 210 hari dan banyaknya curah hujan setahun 2.471 mm.

Daerah Kota Batam memiliki wilayah air tanah perbukitan lipatan yang terdapat hampir di sebagian

wilayah. Wilayah air tanah ini terdapat pada kawasan dengan batuan penyusun berupa batu pasir, batu lempung, fillit, dan kuarsit yang bersifat padu. Umumnya air tanah tersimpan dalam aquafir berupa rekahan atau secah serta pada material rombakan hasil lapukan batuan padu tersebut dan terdapat pada kedudukan dangkal. Wilayah gugus kepulauan Batam dan sekitarnya mempunyai potensi rendah sampai sedang.

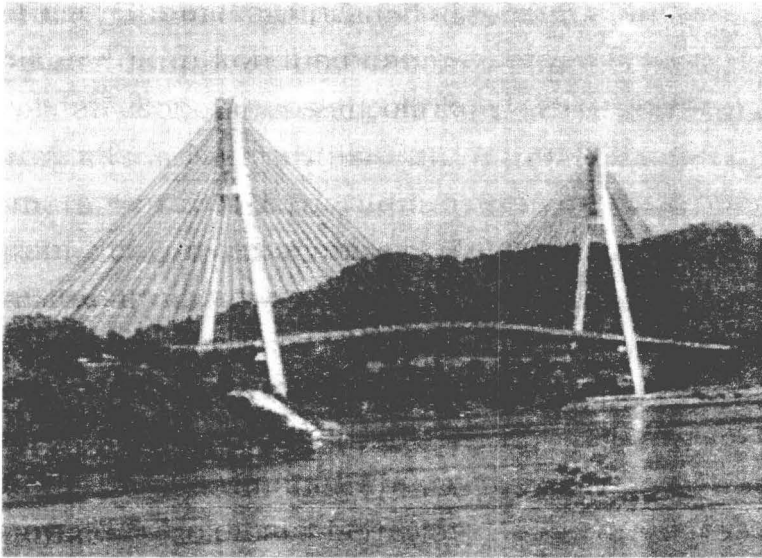


Foto: Jembatan Barelang Batam

2. Kependudukan

Keberadaan penduduk di Kota Batam setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, oleh sebab itu berbagai upaya dalam bidang kependudukan telah dilakukan guna mengantisipasi lonjakan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Berbagai program pemerintah daerah dalam melaksanakan pengendalian jumlah penduduk telah dilakukan seperti; pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian bayi dan anak, perpanjangan usia harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk. Semuanya itu diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan penduduk agar seimbang dan terkendali.

Sejak awal Pulau Batam dan beberapa pulau disekitarnya dikembangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi daerah Industri, Perdagangan, Alih kapal dan Pariwisata. Keberadaan penduduknya setiap tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil sensus yang pernah dilakukan pada priode 1999 -2000 laju pertumbuhan penduduk Batam rata-rata sebesar 12,87 %. Sedangkan berdasarkan hasil registrasi penduduk yang pernah dilakukan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam

pada tahun 2005 diperoleh informasi jumlah penduduk Kota Batam sebanyak 636.792 jiwa, jika dibandingkan dengan keadaan penduduk tahun 2004 maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi peningkatan sebesar 6,67% atau bertambah sebanyak 45.476 jiwa. Walaupun mengalami peningkatan jumlah angka persentase, namun sebenarnya pada priode ini pertumbuhan penduduk terlihat ada penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang diduga erat kaitannya dengan situasi Kota Batam khususnya pada bidang ekonomi yang tidak sekonduisif pada tahun-tahun sebelumnya.

Persebaran penduduk setiap kecamatan di Kota Batam, dimana penduduk terpadat terdapat di daerah Kecamatan Sagulung dengan jumlah penduduk sebesar 124.985 jiwa. Sedangkan urutan kedua terpadat adalah terdapat di Kecamatan Sekupang sebanyak 114.114 jiwa, dan posisi ketiga terpadat justru terdapat di Kecamatan Batam Kota dengan jumlah penduduk sebanyak 110.866 jiwa.

Sedangkan untuk tingkat kelurahan di Kota Batam penduduk terpadat terdapat di Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji dengan jumlah penduduk sebanyak 39.456 jiwa, urutan kedua terbanyak penduduknya adalah Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei.

Beduk dengan jumlah penduduk sebanyak 35.702 jiwa. Sedangkan urutan ketiga penduduk terbanyak untuk tingkat kelurahan terdapat di Kelurahan Sagulung Kota dengan jumlah penduduk sebanyak 30.332 jiwa.

Untuk daerah terkecil jumlah penduduknya pada tingkat kecamatan terdapat di Kecamatan Bulang dengan jumlah penduduk hanya 11.293 jiwa, urutan kedua adalah Kecamatan Galang dengan jumlah penduduk 18.663 jiwa, selanjutnya adalah Kecamatan Belakang Padang dengan jumlah penduduk sebesar 22.832 jiwa. Sedangkan untuk tingkat kelurahan jumlah penduduk terkecil adalah Kelurahan Pecong Kecamatan Belakang Padang dengan jumlah hanya 885 jiwa, urutan kedua Kelurahan Air Raja Kecamatan Galang dengan jumlah penduduk 904 jiwa, dan urutan ketiga adalah Kelurahan Subang Mas Kecamatan Galang dengan jumlah penduduk 1.132 jiwa.

BAB III

EKSISTENSI BATAM

1. Kebijakan dan Peraturan Pemerintah Berkaitan dengan Batam

Keinginan pemerintah pusat pada masa lalu untuk membangun dan mengembangkan kawasan Batam bukanlah sebatas wacana semata, tetapi hal itu diimplementasikan sesuai dengan perencanaan awal pembangunannya. Guna memperlancar keinginan tersebut, maka perlu dasar hukum baik berupa kebijakan atau peraturan maupun undang-undang yang mendukung pelaksanaannya. Adapun kebijakan dan peraturan yang pernah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan pengembangan Batam, antara lain adalah:

- Kepres No. 65 Tahun 1970, tentang Proyek pengembangan Pulau Batam. Ibnu Sutowo ditunjuk sebagai penanggung jawab, terutama yang menyangkut penggunaan biaya pembangunan proyek yang anggarannya disisihkan dari anggaran Pertamina
- Kepres No. 74 Tahun 1971, tentang Pembangunan Pulau Batam dengan membentuk Badan Pimpinan

Daerah Industri yang bertanggung jawab kepada Presiden.

- Kepres No. 41 Tahun 1973, tentang Pulau Batam ditetapkan sebagai daerah lingkungan kerja industri, dan Ibnu Sutowo dikukuhkan sebagai ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) meliputi pulau: Batam, Janda Berhias, Ngenang, Tanjung Sauh, Moi-Moi, dan Kasem.
- Kepres No. 33 Tahun 1974, dibentuk beberapa kawasan berikat (*bonded zone*). Waktu itu pemerintah menunjuk PT. Persero Batam sebagai pelaksana kawasan *bonded zone* di Sekupang dan Batu Ampar.
- Kepmendagri No. 43 Tahun 1977, tentang Pengolahan dan Penggunaan Tanah di Batam.
- Kepmendagri No. 77 Tahun 1977, tentang pemberian hak pengelolaan atas seluruh areal yang terletak di Pulau Batam termasuk tanah gugusan Pulau Janda Berhias, Tanjung sauh, Ngenang, Pulau Kasem, dan Moi-moi.
- Kepmen Perdagangan No. 147/Kpb/V/1977 dan Kepmen Perhubungan No. KM.119/0/Phb/1977, tentang Pengembangan Lalu Lintas Perdagangan sesuai kebijakan pemerintah yang dilaksanakan

oleh Otorita Daerah Industri Pulau Batam.

- SK Ketua BKPM No. 1 Tahun 1978, tentang pemberian Perlimpahan Wewenang Pengurusan dan Penilaian Permohonan Penanaman Modal di Pulau Batam.
- Kepres No. 41 Tahun 1978, tentang seluruh Pulau Batam ditetapkan sebagai kawasan berikat (*bonded zone*).
- Kepres No. 194/M/1978, tentang pengangkatan Prof. DR. Ing. BJ. Habibie sebagai Ketua Otorita Batam dan Mayjen. TNI Soedarsono D. sebagai ketua Badan Pelaksana.
- Kepmen Kehakiman No. M. 01-PW-10-01-83, tentang Penetapan Pulau Batam Sebagai Daerah Berstatus Di Bidang Keimigrasian.
- Kepmen Perdagangan dan Koperasi No. 70/Kp/1983, tentang Pelimpahan Wewenang Di Bidang Perdagangan dan Koperasi.
- Kepres No. 15 Tahun 1983, tentang Kebijakan Pengembangan Pariwisata, dalam hal ini pelabuhan laut dan udara di Pulau Batam ditetapkan sebagai pintu masuk wisatawan dari luar negeri.
- PP No. 34 Tahun 1983, tentang Pembentukan Kotamadya Batam.
- Kepres No. 7 Tahun 1984, tentang Hubungan Kerja

Antara Kotamadya Batam dengan Otorita Batam.

- Kepres No. 28 Tahun 1992, tentang Wilayah Kerja Otorita Batam diperluas meliputi Bareleng (Batam, Rempang, Galang, dan pulau sekitarnya)
- Keppres No 94 Tahun 1998 Penyempurnaan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam
- UU No. 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kota Batam (beberapa Kabupaten dan Kota lainnya). Khusus untuk Kota Batam dalam undang-undang tersebut, salah satu bagian dalam pasalnya ada dinyatakan bahwa, ... dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya (Kota Batam) mengikut sertakan Otorita Batam.

Demikian sekilas disebutkan peraturan dan kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah pusat sejak awal dimulainya pembangunan daerah ini hingga terbentuknya Pemerintah Kota Batam pada tahun 1999, guna percepatan pembangunan dan pengembangan daerah Batam. Setelah terbentuknya Pemerintah Otonomi Kota Batam, tentu saja peraturan dan kebijakan bagi daerah Batam lebih didominasi oleh aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Namun demikian,

bukan berarti semua kebijakan bagi daerah ini ditentukan sepenuhnya oleh daerah, untuk urusan-urusan tertentu khususnya yang berimplikasi pada hubungan luar negeri dan berpengaruh secara nasional maka kebijakan masih tetap menjadi kendali pada pemerintah pusat. Apalagi yang berhubungan dengan penetapan status daerah bagi kepentingan tertentu maka pusat masih tetap memegang kendali dalam pengambilan keputusannya. Seperti beberapa waktu lalu, adanya keinginan daerah ini khususnya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang termasuk di-dalamnya pemerintah Kota Batam untuk memberlakukan kawasan FTZ (*free trade zone*) maka keputusan tersebut merupakan ketentuan dari pemerintah pusat.

2. Perkembangan Pulau Batam

Pada kurun waktu yang panjang setelah berakhirnya masa kerajaan Melayu di kawasan ini hingga masa kemerdekaan, Pulau Batam dan sekitarnya tidaklah dikenal, selain hanya merupakan daerah kepulauan yang sepi seolah tak bertuan. Keberadaan daerah ini lebih dipadati oleh semak belukar dan rawa-rawa yang tak tersentuh oleh tangan manusia dan hal itu berlangsung lama.

Suasana di daerah ini sangat bertolak belakang dengan pulau di sebelah Utaranya yang hanya berjarak 12,5 mil laut yaitu negara Singapura.

Sebelum pemerintah “campur tangan” melalui berbagai kebijakannya yang dimulai pada tahun 1970, pulau Batam hanyalah sebuah pulau sepi di daerah perbatasan. Pemanfaatan wilayah ini pada awalnya hanya sebatas basis logistic dan eksploitasi minyak lepas pantai. Kemudian seiring dengan waktu, pulau ini mengalami perubahan dari kawasan sepi menjadi sebuah kota metropolitan. Kemajuan pembangunan yang terjadi tersebut bukanlah suatu proses alamiah, tetapi lebih diakibatkan karena adanya perhatian dan keinginan pemerintah pusat yang memandang daerah ini sangat potensial jika dikembangkan sebagai daerah pertumbuhan ekonomi dan diharapkan dapat memberikan arti penting bagi perkembangan ekonomi secara nasional. Keinginan pemerintah pusat waktu itu diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang dibuat guna memberikan dasar hukum sebagai pelaksanaan pembangunan pulau Batam. Kebijakan dan peraturan bagi daerah ini dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk daerah perbatasan ini

bermacam-macam dari mulai peraturan, kepres, hingga berupa undang-undang yang kesemuanya itu bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan daerah perbatasan di kawasan pulau Batam dan sekitarnya.

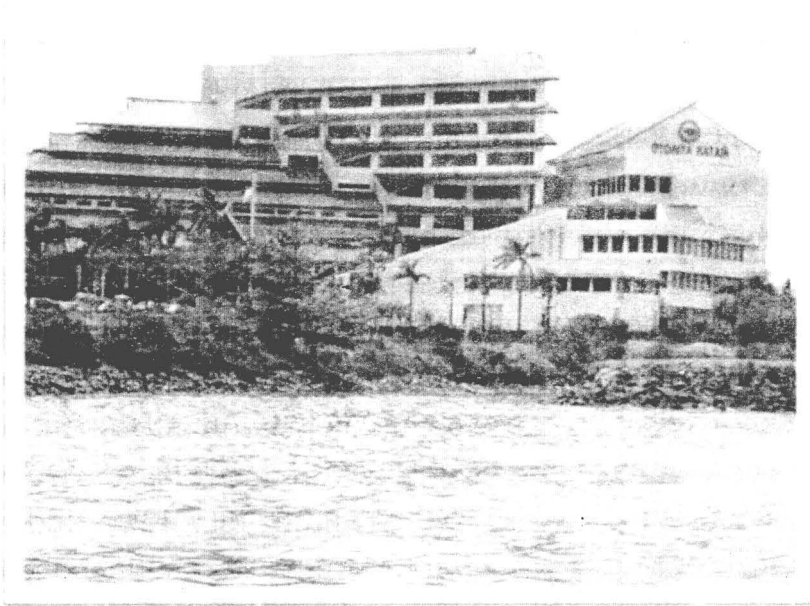


Foto: gedung Otorita Batam (repro: wikipedia.org)

Sarana penunjang yang telah dibangun di Batam sebelum terbentuknya Kota Otonom kesemuanya tidak lepas dari peran serta Otorita Batam, beberapa di antaranya telah disebutkan di atas. Sehingga ke-

beradaan Otorita Batam sebagai pengelola wilayah industri dapat dikatakan sebagian besar telah berhasil melakukan perencanaan dan pembangunannya. Hingga kini kiprah Otorita Batam, sebagian masih dilakukan sesuai dengan aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun kewenangannya sudah tidak seperti sebelumnya.

Keberadaan institusi Otorita Batam sebagai penguasa tunggal yang selama ini telah membangun dan mengelola wilayah Batam tidak berlangsung lama. Diawali dengan pembentukan Kotamadya Batam pada tahun 1983, dimana Kotamadya Batam bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayahnya dengan tetap berkoordinasi dengan Otorita Batam. Kewenangan Otorita Batam sebagai penguasa tunggal perlahan mulai terkikis dan tumpang tindih antara Otorita Batam dan Pemerintah Daerah, ditambah lagi dengan diberlakukannya UU 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas dalam mengelola wilayahnya. Apalagi dengan terbentuknya Pemerintah Kota Batam, maka dikhawatirkan terjadi tumpang tindih kewenangan di lapangan. Walaupun berbagai aturan pendukung telah dibuat guna mengatur tata laksana

masing-masing lembaga agar tidak terjadi “perebutan” kewenangan namun dalam pelaksanaannya tetap saja ada beberapa permasalahan yang berpotensi terjadi tumpang tindih kewenangan.

Masa-masa dualisme pengelolaan di Batam tidak menimbulkan masalah yang pelik walau potensi itu ada, tetapi masing-masing pihak dapat bekerja melaksanakan program pembangunan dengan tetap berkoordinasi antara keduanya. Namun sebagaimana yang disebutkan bahwa kekuasaan Otorita Batam semakin berkurang dan puncaknya mulai terasa pada tahun 2007, dimana pemerintah mengeluarkan peraturan tentang FTZ BBK (*Free Trade Zone* Batam Bintan dan Karimun). Terkait dengan Peraturan Pemerintah tersebut maka Otorita Batam harus segera melimpahkan semua aset dan kewenangan yang dimilikinya kepada Pemerintah Daerah dan lembaganya dilebur ke dalam BPK (Badan Pengembangan Kawasan) Batam. Periode ini merupakan masa-masa berakhirnya kewenangan dan lembaga Otorita Batam. Namun walaupun Otorita Batam telah berakhir tetapi pembangunan yang telah dilakukannya tidak dapat dilupakan begitu saja, karena berkat usaha dan kerja keras dari Otorita Batam keberadaan Batam bisa seperti saat ini.

Di lain pihak, walaupun status Otorita Batam telah diatur sesuai dengan ketetapan pemerintah sebagaimana disebutkan, namun kewenangan dan kebijakan serta berbagai atribut Otorita Batam masih dapat dijumpai. Artinya keberadaan Otorita Batam tidak sepenuhnya berakhir, seperti atribut petugas keamanan di Bandara dan sebagainya. Namun sebenarnya setelah keluar Peraturan Pemerintah No 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Maka Otorita Batam secara resmi berubah nama menjadi Badan Pengembangan Kawasan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka atribut dan logo juga harus disesuaikan. Sosialisasi penyesuaian nama institusi sebenarnya telah dilakukan oleh ketua OB Mustofa Wijaya, di Stadion Temenggung Abdul Jamal. Batam, Minggu, pada puncak HUT ke-37 OB yang kini juga menjadi Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam atau Batam Indonesia *Free Zone Authority* (BIFZA) dengan logo barunya. Terlepas dari semua persoalan tersebut, bagaimanapun bentuk pengelolaan Batam diharapkan ke depan daerah perbatasan ini dapat lebih maju di masa yang akan datang.

Situasi Batam kini setelah dikelola oleh Pemerintah Kota Batam bersama dengan pihak Badan Peng-

usaha (BP) Kawasan Batam atau Batam Indonesia *Free Zone Authority* (BIFZA) tetap tumbuh dan berkembang dan setiap tahunnya mengalami peningkatan pembangunan baik berupa sarana maupun prasarannya. Keberadaan berbagai fasilitas yang selama ini menjadi faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi di daerah ini terus dibenahi, demikian pula dengan fasilitas pendukung lainnya yang belum tersedia tetap diupayakan pembangunannya oleh Pemerintah Kota Batam.

Bidang transportasi, bagi bandara dan pelabuhan yang sebelumnya telah dibangun oleh pihak Otorita Batam, kini menjadi semakin ramai oleh lalu lintas perhubungan dengan melayani berbagai rute seluruh Indonesia bahkan hingga ke mancanegara. Lalu lintas perhubungan baik udara maupun laut di daerah ini keberadaannya cukup baik, hal itu tidak terlepas dari ketersediaan berbagai armada kapal maupun pesawat udara yang banyak melayani rute Batam. Selain melayani perjalanan domestik dan internasional untuk Bandara Hang Nadim saat ini juga telah menjadi satu-satunya tempat pemberangkatan bagi jemaah haji untuk kawasan ini, sehingga tentu saja bandara ini menjadi semakin penting artinya tidak hanya bagi masyarakat daerah ini tetapi bagi

kepentingan yang lebih luas. Selain itu, tidak jarang pemanfaatan lokasi Batam dengan keberadaan bandara dan pelabuhannya dimanfaatkan sebagai tempat transit oleh berbagai kalangan untuk menuju negara tetangga baik Singapura maupun Malaysia atau sebaliknya. Menurut mereka dengan memanfaatkan jalur lewat Batam menuju luar negeri maka biaya yang dikeluarkan bisa lebih hemat dan sekaligus dapat menikmati hiburan dan wisata yang ada di Batam.

Oleh sebab itu, dengan berbagai fasilitas yang ada memudahkan akses menuju Kota Batam, dengan dukungan keberadaan pelabuhan laut domestik dan internasional serta didukung oleh Bandar Udara Internasional Hang Nadim dalam kunjungan yang datang maupun keluar dari Kota Batam. Demikian juga ketersediaan transportasi dalam kota pun didukung dengan berbagai jenis taksi, minibus serta bus kota yang melayani masyarakat dalam beraktivitas. Sebagai kota metropolis, bus pilot project sedang diujikan guna mewujudkan sistem transportasi massal yang aman dan nyaman di masa yang akan datang.

Fasilitas yang dimiliki oleh Bandara Hang Nadim Batam saat ini memiliki landasan pacu 4,025 X 45 M, sedangkan Apron seluas 110,541 M2 dan

direncanakan tahap akhir pembangunannya seluas 170.000 M2. Bandara ini dapat dilandasi oleh berbagai jenis pesawat khususnya type B-747. Daya tampung penumpang terminal/tahun sebanyak 3.300.000 dan direncanakan akan dapat menampung lebih banyak lagi sekitar 8.300.000.

Jenis alat transportasi yang terdapat di Batam beraneka macam dan cukup mudah untuk mendapatkannya. Selain pesawat dan kapal laut dengan berbagai rute dan tujuan, di dalam kawasan Pulau Batam juga tersedia angkutan transportasi seperti; taxi, angkot, bus, ojek dan sebagainya. Dengan demikian, tidak ada kendala bagi masyarakat dan wisatawan untuk mencari dan memanfaatkan sarana transportasi di daerah ini.

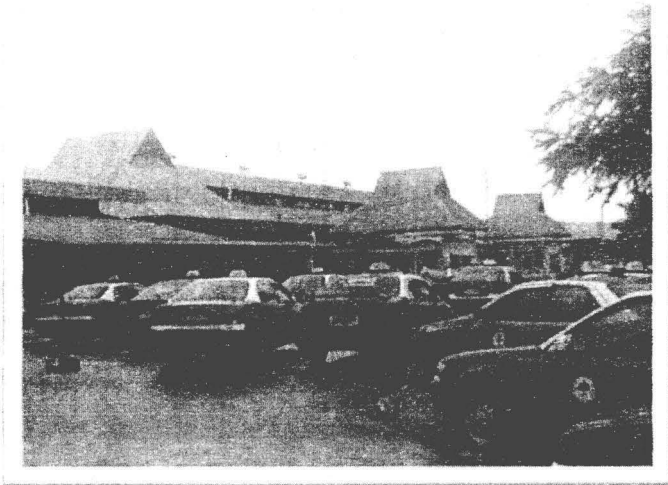


Foto: taxi di pelabuhan domestic dan international
di Sekupang



Foto: angkutan umum Damri tetapi masih terbatas
melayani rute tertentu

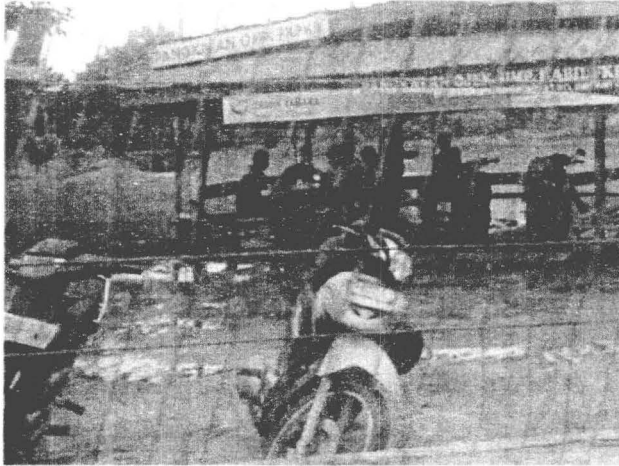


Foto: salah satu pangkalan ojek di Batam



Foto: angkot tetapi terbatas pada jalur tertentu

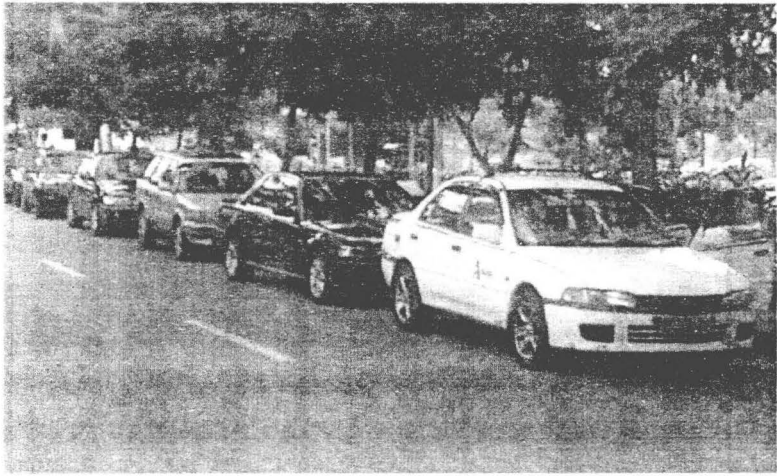


Foto: taxi, cukup banyak tersebar diberbagai tempat, baik yang resmi dengan menggunakan plat nomor kuning maupun yang tidak resmi dengan menggunakan plat nomor hitam

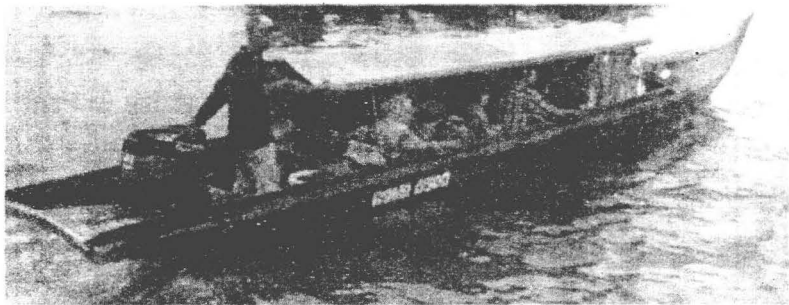


Foto: boat pancung (selain kapal ferry dan sped boat), kendaraan ini juga digunakan oleh masyarakat untuk menuju pulau-pulau sekitar

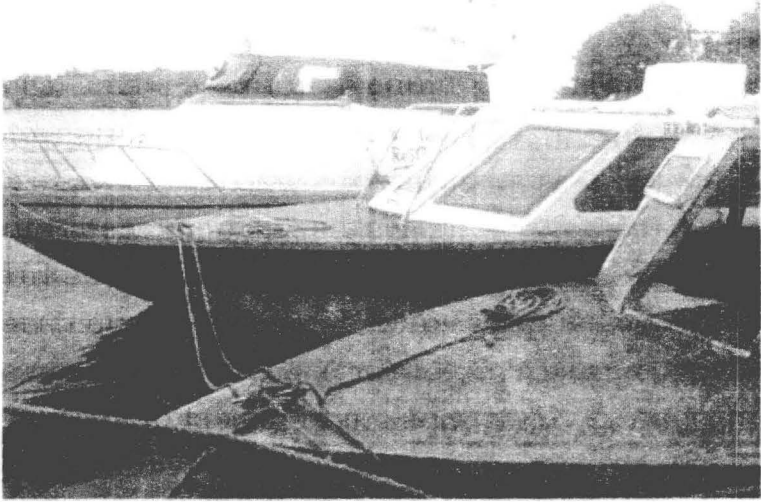


Foto: kapal ferry dan sped boat yang digunakan untuk menuju pulau sekitar dan daerah lainnya.

Selain ketersediaan transportasi yang cukup memadai, saat ini Kota Batam terus berbenah dan bergeliat menuju Kota metropolitan di kawasan perbatasan. Seperti misalnya, centra bisnis di Kota Batam setiap saat selalu ramai dengan berbagai aktifitasnya, yaitu kawasan bisnis Nagoya dan Jodoh yang merupakan beberapa pusat bisnis yang cukup dikenal luas oleh berbagai kalangan tidak hanya bagi masyarakat Batam tetapi bagi berbagai kalangan baik

local maupun mancanegara yang berkunjung ke daerah ini. Selain itu, masih banyak lagi fasilitas lainnya yang tersebar diberbagai tempat di Batam yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Selain itu, masih banyak kawasan bisnis, pusat perbelanjaan, dan kawasan industri maupun alih kapal yang tersebar diberbagai tempat di Kota Batam yang tidak dapat dikemukakan secara menyeluruh, di antaranya yang tidak kalah menarik adalah kawasan Batam Center. Kawasan ini sebenarnya lebih banyak aktifitas kegiatan pemerintahan dan perkantoran, namun demikian berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga tersedia di kawasan ini seperti pelabuhan international dan pusat perbelanjaan. Di daerah ini juga dibangun mesjid raya Batam dan terdapat juga asrama haji dengan berbagai fasilitasnya.

3. Kondisi Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pemerintahan

Rasanya tidak ada orang yang tidak mengenal nama Batam, jika disebut "Batam" maka orang akan langsung tahu walaupun mereka belum pernah menginjakkan kakinya ke daerah tersebut. Begitulah pada umumnya pengetahuan orang tentang Batam,

mereka sangat akrab dengan sebutan Batam bahkan tidak sedikit diantaranya yang jika ditanya tentang Batam maka biasanya akan langsung membayangkan negara Singapura karena ketenaran nama Batam sulit dilepaskan dari keberadaan Singapura. Bahkan orang lebih mengenal nama Batam dibanding nama ibukota propinsinya Tanjungpinang, padahal Kota Tanjungpinang merupakan kota tua untuk wilayah Kepulauan Riau. Begitu terkenalnya Batam tidak hanya oleh kalangan pribumi tapi hingga ke Mancanegara, dan hal itu tidak mengherankan karena daerah ini merupakan daerah industri, pariwisata dan lebih penting lagi adalah merupakan daerah perlintasan jalur perdagangan dunia. Selain itu, daerah ini juga merupakan daerah tujuan para pencari kerja dari berbagai daerah di tanah air.

Keberadaan Kota Batam kini tentu berbeda jauh dengan keadaannya pada dekade sebelum tahun 70-an. Perkembangan dan pembangunannya sudah melaju pesat mengejar ketertinggalannya dengan negara tetangga Singapura, walau masih jauh dari harapan untuk dapat menyamai negara tersebut tetapi kemajuan yang dicapai kota yang berada di daerah perbatasan ini cukup dirasakan manfaatnya dan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi

di wilayah Barat Indonesia. Banyak kemajuan yang telah dicapai oleh daerah ini dalam menunjang pembangunan tidak hanya pada skala lokal tetapi secara nasional. Berbicara kemajuan yang telah dicapai oleh daerah perbatasan ini tentu sangat luas cakupan permasalahannya meliputi berbagai bidang pembangunan, sebelumnya telah diulas secara ringkas pada yang berkaitan dengan sejarah dan perkembangan Batam. Pada tulisan ini penulis mencoba mengemukakan keberadaan dan situasi Kota Batam saat ini khususnya pada bidang ekonomi, sosial budaya, dan pemerintahan.

A. Bidang Ekonomi

Secara umum perekonomian di Batam berjalan dengan baik walaupun tidak terlepas dari dinamika dan pasang surut tingkat pertumbuhan pada setiap tahunnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari gejolak dan situasi politik dan ekonomi baik secara nasional maupun internasional. Kondisi yang stabil tentu turut serta merangsang pertumbuhan ekonomi yang baik pula. Berbagai hal tersebut turut serta mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan ini.

Walau dinamika pertumbuhan ekonomi selalu

terjadi namun tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Batam lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sehingga menjadikan wilayah ini menjadi tonggak untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan untuk Provinsi Kepulauan Riau. Berbagai bidang pembangunan yang telah dilakukan meliputi sektor komunikasi, sektor listrik, gas dan air, sektor perbankan, sektor industri dan modifikasi kapal, sektor perdagangan dan layanan adalah tonggak utama ekonomi Kota Batam yang tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat Batam dan nasional tetapi merupakan komoditas ekspor untuk berbagai negara. Sebagaimana disebutkan dalam bpb Batam.go.id bahwa, Keberadaan dari aktivitas ekonomi di kota ini juga dalam rangka meningkatkan bidang pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Batam sebagai eksekutif dari pembangunan kota Batam bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dari kawasan Kota Batam serta Badan Pengusahaan Batam berpartisipasi dalam melanjutkan pembangunan, memiliki komitmen dalam mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi Kota Batam, ini terbukti dengan keberadaan nota kesepakatan dari tiga lembaga, yang diharapkan setelah itu adalah

untuk penciptaan pembangunan dari Kota Batam yang berkesinambungan. Batam, dengan Bintan dan Karimun saat ini memiliki status sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (*Special Economic Region*). Dengan ini diharapkan mampu meningkatkan investasi di Batam dalam jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Perekonomian Kota Batam yang konsentrasi pembangunannya diarahkan pada bidang industri, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata pada dasarnya selalu mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan. Namun, seperti yang telah disebutkan di atas bahwa pertumbuhan yang terjadi mengalami pasang surut akibat dampak dari keadaan dan situasi politik dan ekonomi nasional dan international baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak terhadap iklim perekonomian di daerah ini. Sebagai contoh, dapat dilihat pertumbuhan ekonomi pada tahun 1997, saat negara mulai dilanda krisis dan suara reformasi mulai bergema diberbagai daerah, dampaknya bagi daerah ini dari segi pertumbuhan ekonomi terasa mulai mengalami perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan pada puncak krisis ekonomi nasional tahun 1998 dimana pada tahun tersebut

mulai bergulir reformasi dan terjadi berbagai peristiwa dan huru-hara diberbagai daerah di Indonesia turut serta mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah Batam yang akibatnya terjadi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi sangat drastis, namun demikian keadaan ekonomi dan tingkat pertumbuhannya masih mampu bertahan walau sangat lambat. Seiring dengan perjalanan waktu dan mulai membaiknya keadaan perekonomian secara nasional turut serta memacu pertumbuhan ekonomi di daerah ini.

Berdasarkan data profil Kota Batam tahun 2005 disebutkan, laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam dalam lima tahun terakhir cenderung membaik, pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi daerah ini sebesar 7,72 persen. Pada tahun 2001 terjadi sedikit perlambatan menjadi 6,56 persen, kemudian pada tahun 2002 meningkat sebesar 7,01 persen. Sedangkan pada tahun 2003 dan 2004 kembali menunjukkan peningkatan, yaitu tumbuh masing-masing sebesar 7,73 persen dan 8,13 persen.

Lebih lanjut pada data tersebut dijelaskan bahwa, membaiknya pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2004 disebabkan adanya peningkatan permintaan produk unggulan ekspor Batam. Disamping itu karena kondisi perekonomian secara nasional yang

mulai kondusif juga telah menyebabkan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing selama tahun 2003 dan 2004 cenderung stabil. Jika kondisi tersebut di atas diikuti dengan adanya kepastian hukum, terutama tentang penyelesaian dualisme kewenangan pengelolaan investasi di Kota Batam yang belum disikapi secara tegas dan terkesan inkonsistennya Pemerintah Pusat dalam penerapan kebijakan di bidang fiskal di Batam serta bentuk FTZ yang tepat, tentunya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Batam.

Pada tahun 2008 laju-pertumbuhan ekonomi Kota Batam kembali mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini pertumbuhan ekonomi Kota Batam hanya mencapai 7,18 persen, sedangkan pada tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kota Batam mencapai 7,52 persen. Bila dilihat distribusi masing-masing sector pendapatan regional pada tahun 2008 sangat dominan berasal dari sektor industri pengolahan sebesar 60,80 persen. Sedangkan sektor lainnya yang juga cukup dominan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 25,10 persen; dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 6,03 persen.

Dari segi pendapatan regional per kapita berdasarkan harga berlaku (*current price*), pada tahun 2008 mencapai Rp 36,82 juta dan berdasarkan harga konstan 2000 mencapai Rp 24,58 juta. Angka yang disajikan merupakan angka perbaikan perhitungan PDRB tahun 2007 dan angka sementara perhitungan PRDB tahun 2008. (Batam Dalam Angka : 2009)

Dalam bidang perbankan, perkembangannya di Kota Batam saat ini dapat dikatakan cukup menggembirakan, hal ini terlihat dengan telah beroperasinya 47 Bank dengan jumlah kantor Bank sebanyak 133 buah. Keberadaan Bank di Pulau Batam sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melayani pemberian kredit, penerimaan tabungan dari masyarakat, pelayanan lalu lintas transfer dan jasa-jasa perbankan lainnya. Penyerapan dana dari masyarakat dari tahun ke tahunnya menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Berdasarkan data Batam Dalam Angka tahun 2009 disebutkan bahwa, pada tahun 2003 sebesar 4.172,2 milyar rupiah, pada tahun 2004 sebesar 5.458,3 milyar rupiah, kemudian tahun 2005 menjadi 6.269,9 milyar rupiah. Pada tahun 2006 mencapai 7.979,2 milyar rupiah, sedangkan pada tahun 2007 dan 2008 penyerapan dana dari masyarakat masing-masing sebesar 9.210,9 milyar

rupiah dan 11.249,2 milyar rupiah.

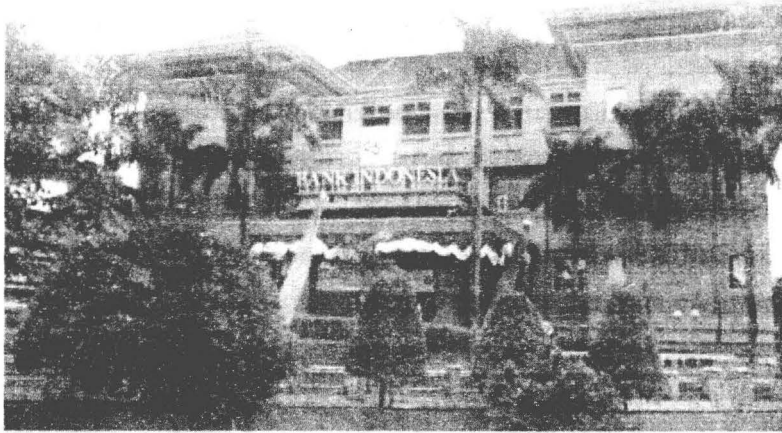


Foto: Bank Indonesia di Batam

Tingkat inflasi Kota Batam pada tahun 2007 (Januari-Desember) berdasarkan data Batam Dalam Angka tahun 2009, sebesar 8,39 persen. Pada periode ini kelompok bahan makanan menunjukkan tingkat inflasi sebesar 13,50 persen. Kelompok makanan jadi, minuman rokok dan tembakau sebesar 7,54 persen. Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 8,09 persen. Kelompok sandang 13,94 persen. Kelompok kesehatan 8,44 persen. Kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga 4,19 persen dan

kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 3,22 persen.

Secara nasional keberadaan daerah ini tidak dapat diabaikan, karena kontribusi yang diberikan pada pembangunan nasional cukup besar. Menurut catatan berbagai sumber dalam kurun waktu tahun 2000 hingga 2005 investasi yang ditanamkan oleh pemerintah sebesar 2 triliun telah kembali sekitar 4,4 triliun (30%) dalam lima tahun terakhir.

Nilai ekonomi lainnya yang tidak kalah penting adalah volume angkutan minyak ke berbagai daerah hingga ke luar negeri, hal itu tidak lain karena posisi kawasan ini di area perbatasan dan jalur perdagangan dunia sehingga sangat menguntungkan dan memudahkan jalur distribusinya. Sebagaimana diketahui sejak dahulu daerah ini merupakan basis logistik dan operasional usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai tidak kurang dari 15 juta barel per hari dan di selat Malaka sekitar 10 juta barel per hari.

Keberadaan bidang ekonomi di Kota Batam secara umum dapat dikatakan cukup baik, namun kemajuan yang telah dicapai selama ini terasa lebih memperhatikan keberadaan pulau Batam itu sendiri, padahal wilayah administratif Kota Batam tidak

hanya melingkupi pulau Batam tetapi masih banyak pulau-pulau lainnya sekitar pulau Batam yang jumlah sangat banyak dan masih jauh dari jangkauan pembangunan dan beberapa di antaranya merupakan kawasan pulau terluar yang perlu mendapat perhatian secara khusus. Sementara ini, yang menjadi perhatian lebih bertumpu pada Bareleng yaitu pulau Batam, Rempang, dan Galang yang merupakan kawasan pembangunan wilayah Batam sejak masa Otorita Batam menjadi penguasa tunggal wilayah ini.

B. Bidang Sosial Budaya

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat tanpa diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai maka akan memunculkan persoalan tersendiri, yang tentu saja akan berdampak pada bidang sosial budayanya. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan penduduk begitu besar adalah keinginan pendatang dari berbagai daerah untuk mencari pekerjaan tanpa dibekali dengan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia yang memadai, hal tersebut hanya akan menambah angka pengangguran. Apalagi kesempatan yang ada saat ini sudah semakin terbatas tidak sesuai

dengan jumlah permintaan pencari kerja. Jika angka pengangguran tinggi maka sangat rentan munculnya berbagai persoalan tindak kriminal dan berbagai aksi kejahatan lainnya. Persoalan penduduk dan lapangan pekerjaan menjadi permasalahan yang saling berkaitan dan pada akhirnya akan berdampak pada bidang lainnya, hal seperti itu biasanya yang selalu dihadapi oleh daerah-daerah perkotaan yang jika dibiarkan maka bukan tidak mungkin akan menjadi dilema yang sulit di atasi jika tidak dicari solusi terbaik terhadap persoalan tersebut.

Permasalahan lainnya yang berdampak pada kehidupan sosial budaya di Batam adalah dengan bermunculannya rumah liar (lebih dikenal dengan istilah “ruli”) yang jumlahnya sudah menjamur hampir di setiap lahan kosong yang kurang pengawasan menjadi sasaran empuk untuk mendirikan bangunan maupun rumah liar. Keberadaan ruli tersebut sebenarnya sering memunculkan konflik antara pemerintah atau pemilik lahan dengan para pemilik rumah liar saat akan digusur karena mereka tidak bersedia pindah atau meninggalkan lahan begitu saja jika tidak ada ganti rugi yang memadai.

Sebenarnya aturan yang diberlakukan di daerah Kota Batam khususnya di Pulau Batam jika ingin

mendirikan bangunan cukup ketat, sebab tidak sembarangan orang dapat membangun rumah atau bangunan lainnya tanpa seizin pemerintah setempat. Jika pengajuan izin dilakukan secara pribadi sangat tidak mungkin dikabulkan karena menyangkut penataan kota dan aturan mendirikan bangunan di daerah ini. Bangunan baru khususnya perumahan hanya diberikan izinnya kepada para pengembang atau developer sehingga tidak sembarang orang dapat mengajukannya. Dengan demikian penataan pemukiman dan perumahan dapat diatur sedemikian rupa dan diselaraskan dengan perencanaan pembangunan Kota Batam guna menghindarkan kesemrautan dan ketidak-teraturan penataan kota.

Disamping itu, pemerintah juga mempersiapkan penyediaan perumahan layak huni yang murah dalam bentuk rumah susun guna mengatasi permasalahan perumahan bagi masyarakat. Rumah susun yang tersedia di Batam sebanyak 287 unit *twin blok* terdiri dari 2.228 yang mampu menampung 8.560 orang pekerja. Pembangunan rumah susun tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat, Otorita Batam, Perumnas, Jamsostek serta Pemerintah Kota Batam

Dalam bidang pendidikan di Kota Batam pada akhir-akhir ini dapat dikatakan cukup mengalami

kemajuan, baik dalam bidang sarana maupun prasarananya. Pembangunan bidang pendidikan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tapi juga oleh pihak swasta mulai dari tingkat pendidikan terendah hingga perguruan tinggi. Banyaknya sekolah dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam berdasarkan data BPS Kota Batam yang bersumber dari Dinas Pendidikan Kota Batam pada tahun 2008 adalah; TK sebanyak 250 buah, SD sebanyak 257 buah, SLTP sebanyak 85 buah, dan SLTA sebanyak 35 buah. Selain itu, masih terdapat beberapa universitas dan sekolah tinggi di daerah ini sebagai sarana bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan tingkat tinggi sehingga bagi mereka yang tidak ingin bersusah payah kuliah hingga keluar daerah mereka dapat menguliahkan anak-anak mereka di daerah ini. Sedangkan data pendidikan yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Batam melalui bpbatam.go.id adalah:

Banyaknya sekolah TK sebanyak 278 buah, SD sebanyak 278 buah, SLTP sebanyak 99, SMU & Kejuruan sebanyak 68, politeknik sebanyak 8 buah. Jumlah fasilitas pendidikan keseluruhan adalah sebanyak 732 buah.

Sedangkan fasilitas kesehatan berdasarkan data yang diperoleh dari bpbatam.go.id adalah Poliklinik dan puskesmas sebanyak 164 buah, rumah sakit sebanyak 12 buah, rumah sakit bersalin sebanyak 35 buah, apotik sebanyak 74 buah, dan toko obat sebanyak 154 buah, total keseluruhan sebanyak 439 buah.

Masyarakat Kota Batam adalah masyarakat yang heterogen yang terdiri dari beragam suku dan golongan, hampir setiap suku bangsa di nusantara ada di daerah ini. Dengan berpayungkan budaya Melayu dan menjunjung tinggi Bhinneka tunggal ika, Kota Batam dapat dikatakan cukup kondusif dalam usahanya mendukung kegiatan ekonomi, sosial politik serta budaya dalam masyarakat. Namun, jika kita melihat secara kasat mata tentang keberadaan masyarakat di Kota Batam dengan beragam suku bangsa hidup dalam masyarakatnya, tentu kita akan menemukan berbagai suku bangsa berada di daerah ini dan umumnya kita akan menemukan kaum pendatang yang lebih mendominasi daerah perkotaannya, seperti; Jawa, Batak, Minang, China, Bugis, Flores, dan sebagainya. Namun dibalik berbagai suku bangsa itu, sebenarnya ada suku bangsa tempatan yaitu suku bangsa Melayu yang hidup

menetap di daerah ini sejak masa lalu. Suku bangsa tempatan itu umumnya mereka berdiam di daerah pulau-pulau sekitar dan pesisir pulau Batam.

Mata pencaharian di perkotaan seperti supir taxi, pedagang, buruh industri, tukang ojek umumnya lebih didominasi oleh etnis pendatang seperti Minang, Batak, Jawa, dan China. Etnis Melayu sangat jarang ditemui melakukan pekerjaan tersebut, mereka pada umumnya lebih mudah di temui di lingkungan birokrasi pemerintah daerah atau di daerah pesisir dan pulau-pulau sekitar. Bagi Masyarakat Melayu yang tinggal di daerah pesisir dan pulau sekitar, mata pencaharian mereka beraneka ragam tetapi umumnya masih seputar pekerjaan yang berhubungan dengan lautan dan menjadi andalan mereka dalam melangsungkan hidup, baik sebagai nelayan maupun pengemudi boat pancung (umumnya digunakan sebagai angkutan umum di pulau sekitar).

Walaupun keberadaan suku bangsa yang beraneka ragam namun kehidupan antar suku bangsa dapat dikatakan cukup harmonis, tetapi tidak dapat dipungkiri sesekali pernah juga terjadi pertikaian antar suku, dan hal itu dapat cepat di atasi berkat kesigapan aparat dan kerjasama para tokoh masyarakat masing-masing suku bangsa di daerah ini.

Bagi masyarakat tempatan yaitu suku bangsa Melayu pada umumnya sebagaimana dengan suku bangsa Melayu di daerah lainnya, mereka sangat terbuka terhadap berbagai suku bangsa pendatang. Toleransi dan menghargai pada suku manapun tetap mereka junjung tinggi tanpa membedakan asal daerah dan latar belakang sosial budayanya, asalkan para pendatang dapat menyesuaikan diri dan tetap saling menghargai antara satu dan lainnya. Keterbukaan masyarakat Melayu merupakan ciri khas budayanya yang telah mereka lakukan sejak masa lalu dan tetap mereka junjung hingga saat ini.

Kebudayaan Melayu dengan berbagai unsur budayanya masih dapat kita saksikan di Kota Batam. Suku bangsa Melayu di daerah ini masih memegang teguh adat istiadatnya. Berbagai unsur budaya Melayu pada masyarakatnya khususnya yang tinggal di pesisir maupun pulau sekitar masih melaksanakan berbagai kebiasaan dan adat istiadat budayanya hingga kini, seperti; permainan rakyat, kesenian tradisional, dan berbagai bentuk budayanya.

Kebudayaan Melayu yang ada di Batam hampir tidak dapat dibedakan dengan budaya Melayu pada umumnya termasuk dengan Melayu yang ada di Tanah Semenanjung (Malaysia dan Singapura)

bahkan dapat dikatakan bahwa mereka lebih cenderung mengikut pada Melayu negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Hal itu tidak terlepas dari hubungan masa lalu dengan daerah tetangga yang lebih banyak mempengaruhinya dibanding daerah lainnya di Indonesia. Selain karena kedekatan secara geografis, hubungan yang terjalin antara budaya serumpun juga sering diikat dengan tali perjodohan dan kekeluargaan antara mereka yang ada di daerah ini dengan warga Melayu yang ada di negara tetangga.

Dalam bidang kehidupan beragama di daerah ini dapat dikatakan cukup harmonis karena hampir seluruh agama ada di Batam seperti: Islam, Kristen, Budha, dan Hindu. Berbagai agama tersebut hidup rukun berdampingan tidak pernah terdengar terjadi perselisihan antar pemeluk agama tersebut. Hal ini tidak terlepas dari ciri khas masyarakat tempatan yaitu etnis Melayu yang cenderung terbuka dan menerima siapa saja pendatang ke daerah mereka tanpa membedakan suku dan agama. Selain itu, toleransi kehidupan beragama khususnya dalam menjalankan ibadah masing-masing pemeluknya berjalan dengan baik tanpa ada hambatan atau pertentangan antara satu dan lainnya. Tidak ada

pembedaan atau sentiment antar kelompok agama tertentu, masing-masing bebas menjalankan aktifitas dan ibadahnya.

Dari segi sarana dan prasarana rumah ibadah dapat dikatakan cukup memadai, berdasarkan data dari BPS yang diperoleh dari Departemen Agama dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun jumlah rumah ibadah terus mengalami peningkatan. Pada tahun tahun 1995 terdapat 132 buah tempat ibadah maka pada tahun 2000 menjadi 364 buah dan tahun 2007 terjadi peningkatan jumlah tempat ibadah menjadi 965 buah. Sedangkan data dari bpbatam.go.id adalah; mesjid sebanyak 680 buah, gereja sebanyak 291 buah, vihara sebanyak 31 buah, dan pure sebanyak 3 buah total jumlah rumah ibadah yang terdapat di Batam saat ini adalah sebanyak 1005 buah rumah ibadah.

C. Bidang Pemerintahan

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa awalnya wilayah Batam dikelola oleh satu badan yang memiliki otoritas penuh terhadap keberadaan dan pembangunan daerah ini yang diberi nama Otorita Batam, kemudian melalui Peraturan Pemerintah No: 34 Tahun 1983 dibentuk suatu lembaga pemerin-

tahan berstatus Kotamadya Administratif Batam. Namun peran dan kewenangan pemerintah administratif Kota Batam pada waktu itu tidaklah memberikan pengaruh berarti terhadap keberadaan dan pembangunan daerah perbatasan ini. Kemudian seiring dengan waktu dan dampak dari dinamika politik dalam negeri khususnya setelah bergulirnya reformasi dan diberlakukannya UU tentang Otonomi Daerah, Di Batam dibentuk pemerintah Kota, sedangkan Otorita Batam dilebur ke dalam institusi Badan Pengusahaan Batam. Berdasarkan undang-undang, Pemerintah Kota Batam telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Selanjutnya guna lebih memperjelas pembagian tugas dan urusan pemerintahan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah dan pemerintahan kabupaten/kota.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Batam adalah:

Visi: Terwujudnya Batam Menuju Bandar Dunia Yang Madani dan Menjadi Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Sedangkan misinya adalah:

1. Mengembangkan Kota Batam sebagai kota pusat kegiatan industri perdagangan, pariwisata,

kelautan, dan alih kapal yang mempunyai akses ke pasar global dalam suatu sistem tata ruang terpadu yang didukung oleh infrastruktur, sistem transportasi, sistem Teknologi Informasi (IT) dan penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, hijau dan nyaman.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui fasilitasi pengembangan dan pembinaan usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM), koperasi dan investasi yang didukung oleh iklim / situasi usaha yang kondusif dan berlandaskan supremasi hukum.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat hinterland dan masyarakat miskin melalui penyediaan fasilitas infrastruktur dasar, penataan dan pembinaan usaha sektor informal serta penanggulangan masalah sosial.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, menguasai IPTEK dan bermuatan IMTAQ melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat serta pembinaan kepemudaan dan olahraga.
5. Menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni budaya Melayu dan budaya daerah

lainnya serta mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang harmonis, bertoleransi dan berbudi pekerti.

6. Memujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik.



Foto: Lambang Kota Batam

Arti Lambang pemerintah Kota Batam sebagai berikut:

1. Bintang, melambangkan masyarakat Batam yang religius dan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Keris Melayu, lambang keperkasaan dan kepahlawanan Laksamana Hang Nadim yang dapat dijadikan contoh bagi masyarakat. Lambang

kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Gelombang berjumlah lima lapis, berarti bekerja atau bekerjanya masyarakat Kota Batam dengan dasar Pancasila, letak geografis Batam yang dikelilingi oleh laut yang berarti juga bahwa Laksamana Hang Nadim berkuasa di daratan dan lautan.
4. Perahu Dendang, yaitu perahu dalam bentuk lambang keperkasaan di laut dan penguasa wilayah.
5. Jembatan Bareleng, lambang kegiatan pembangunan Kota Batam yang menjembatani kemajuan perdagangan, industri, pariwisata dan alih kapal.
6. Pita berwarna merah dan tulisan Kota Batam, berarti siap menghadapi/memasuki era baru/ alaf millennium III dan kemajuan zaman.
7. Rantai, berjumlah 45 melambangkan semangat persatuan/persaudaraan antar masyarakat Kota Batam yang heterogen.

Sedangkan arti warna lambang pemerintah Kota Batam adalah:

- a. Warna Utama

1. Merah, berarti keberanian
 2. Kuning, berarti keagungan
 3. Hijau, berarti kesuburan dan kemakmuran
- b. Warna Pendukung
1. Hitam, berarti keabadian
 2. Putih, berarti kesucian
 3. Biru, berarti ketenangan atau keluasan

Secara administratif keberadaan daerah kecamatan dan kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam, maka awalnya jumlah kecamatan di Kota Batam semula 8 Kecamatan berubah menjadi 12 kecamatan.

BAB IV

POTENSI DAN

PERMASALAHANNYA

Berbicara potensi akan menyentuh berbagai kekayaan dan berbagai sumber daya yang dimiliki baik secara fisik maupun non fisik. Potensi merupakan sumber daya yang dimiliki yang dapat dimanfaatkan guna mendukung kesejahteraan dan pembangunan. Potensi di kawasan perbatasan tidak hanya terbatas pada sumber daya alam dan manusianya tetapi menyangkut berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan demi kemajuan wilayah tersebut. Jika diuraikan satu per-satu potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh Batam sebagai salah satu kawasan perbatasan di Indonesia tentu akan sangat luas, oleh sebab itu pada tulisan ini tidak mengulas satu demi satu, namun demikian tetap diupayakan mengungkap berbagai potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh Batam sebagai daerah perbatasan yang memiliki posisi yang sangat strategis.

Potensi utama Batam yang sangat potensial tentunya adalah posisi kawasan ini yang sangat

strategis yang berada pada jalur lintas perdagangan dunia serta berdekatan dengan negara tetangga yang maju dalam bidang perdagangannya yaitu Singapura. Sehingga tentu saja situasi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberi nilai tambah tersendiri bagi potensi kawasan ini untuk berkembang. Rasanya tidak ada yang tidak bisa dilakukan bagi daerah ini, apa saja bentuk usaha yang dilakukan pasti akan memberikan keuntungan hanya tinggal bagaimana melakukan pengelolaan dan pemberdayaannya. Sebagaimana diketahui awal pembangunan Batam pada era tahun 70-an, daerah ini hanyalah pulau yang sepi, namun berkat kesungguhan serta kerja keras akhirnya dalam waktu singkat daerah ini menjelma menjadi suatu kawasan metropolitan di kawasan Barat Indonesia. Kesemuanya itu bukan suatu mukzijat atau muncul begitu saja, tetapi tidak terlepas dari dukungan dan kemauan dari pemerintah dalam memajukan kawasan ini sebagai salah satu kawasan industri.

Menjadi pertanyaan adalah, apakah potensi kawasan Batam hanya sebatas kawasan industri? Tentunya tidak. berbagai kekayaan sumber daya alam khususnya di bidang maritime yang berlimpah, namun belum sepenuhnya digali padahal memiliki

potensi yang luar biasa bagi mendukung kemajuan daerah perbatasan ini dan berbagai potensi lainnya sangat potensial untuk dikembangkan sehingga keberadaan kawasan ini benar-benar dapat menjelma menjadi suatu kawasan metropolitan yang mandiri dan dibutuhkan keberadaannya bagi kawasan lainnya, tidak hanya bagi kepentingan kawasan dalam negeri tetapi bagi kawasan Asia Tenggara umumnya.

Secara regional daerah ini merupakan wilayah strategis antara daratan Sumatera, Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Potensi letak yang strategis bagi dalam negeri tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal, bahkan diharapkan kawasan ini dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi dan bidang lainnya untuk kawasan Barat. Potensi itu dapat dijadikan modal bagi keberadaan wilayah ini di masa yang akan datang untuk dapat lebih maju dan diharapkan dapat menjadi pusat berbagai bidang kehidupan untuk kawasan Barat Indonesia. Letaknya dalam posisi regional tentu saja memberikan nilai tambah bagi pengembangan kawasan ini, hanya saja tergantung bagaimana pengelolaan/strategi pengembangan kawasan ini yang tidak hanya terpaku pada misi awal pembangunan pulau Batam yang telah dilakukan oleh pihak Otorita Batam tetapi harus dapat

menjangkau pada bidang yang lebih luas karena masih banyak lagi potensi terpendam yang belum digali sepenuhnya. Apalagi saat ini dengan telah terbentuknya Pemerintah Kota Batam seharusnya pembangunan segala bidang kehidupan dapat dipenuhi. Komponen pemerintahan diberbagai bidang telah terbentuk melalui berbagai SKPD dan dinas instansinya tinggal bagaimana mengoptimalkan kinerja masing-masing lembaga agar misi dan visi yang lebih luas dapat tercapai.

Jika ingin maju seperti negara tetangganya Singapura, maka pola pikir aparat dan pengambil kebijakan di wilayah ini juga harus setingkat dengan negara tetangganya jika perlu malah melebihi dari Singapura, jadi tidak hanya terkungkung pada level status pemerintahan pada tingkat Kota semata. Hal itu, tidak hanya berlaku bagi pemerintahnya tetapi juga masyarakatnya, masyarakat harus dibangun karena tanpa dukungan dari seluruh elemen masyarakat maka apapun program yang akan dilaksanakan akan sulit tercapai. Pemerintah Kota harus mampu menggerakkan potensi dan nilai jual Batam sebanding dengan Singapura. Hal itu tergantung bagaimana Pemerintah Kota menggerakkan potensi Batam agar lebih bermanfaat dan

berguna bagi seluruh lapisan tidak hanya bagi dalam negeri tetapi hingga ke mancanegara. Sehingga keberadaan Batam dapat lebih menarik dan berpotensi dibanding Singapura.

Sebagai wilayah kepulauan, tentu saja bidang maritime dengan berbagai potensinya harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Sinergi program kerja dari berbagai kelembagaan yang menangani bidang kelautan perlu dilakukan, tidak berjalan sendiri-sendiri bahkan diharapkan dapat mengikut sertakan masyarakat melalui LSM yang menggeluti bidang ini. Pengawasan yang ketat harus diterapkan terhadap wilayah kelautannya, tidak hanya bagi kegiatan criminal, pencurian, penyeludupan atau penyusupan tetapi pengawasan terhadap kerusakan lingkungan, berbagai limbah atau dampak negatif dari suatu kegiatan pembangunan dan industri yang berdampak terhadap kehidupan kelautan. Pengawasan harus mensinergikan kegiatannya dengan melibatkan berbagai para pihak seperti AL, Bea Cukai, DKP, POLAIR, Lingkungan, Kesehatan, dan sebagainya. Masing-masing pihak harus diberi pengetahuan tentang berbagai permasalahan tersebut. Diharapkan apabila memungkinkan dapat dibentuk suatu lembaga koordinasi atau lembaga

bersama dari berbagai komponen tersebut sehingga berbagai permasalahan yang muncul dapat cepat ditangani. Dengan kolaborasi berbagai institusi yang berkaitan tugas dan kewenangannya pada bidang kelautan diharapkan dapat mencegah atau setidaknya meminimalisir kegiatan ilegal di kawasan perairan yang memerlukan penanganan terpadu guna mengatasi kegiatan ilegal yang menggunakan peralatan semakin canggih. Kegiatan ilegal di kawasan laut perbatasan bukan hanya sebatas pencurian ikan dan penyusupan tetapi para pelaku kejahatan juga mengincar berbagai kekayaan laut yang lain seperti harta karun, endapan mineral, koral dan lain-lain. Kekayaan alam laut kawasan perbatasan yang sejak masa lalu telah ramai oleh lalu lintas perdagangan tentu menyimpan kekayaan tersendiri. Dari begitu banyaknya potensi alam laut wilayah perbatasan, namun baru sedikit sumber kekayaan laut yang dimanfaatkan, hal tersebut tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Pengelolaan kawasan kelautan memiliki permasalahan tersendiri yang tidak bisa diabaikan. Selain pengawasan terhadap garis perbatasan dan sumber daya yang dimilikinya, pengelolaan kelautan harus mempertimbangkan antara pemanfaatan kawasan dan

pelestariannya agar kesinambungan lingkungan dapat terjaga. Pemanfaatan kawasan pesisir pantai yang banyak dibangun berbagai industri yang juga merupakan komponen penting pembangunan dan investasi tetapi keterjagaan lingkungan juga harus diperhatikan agar pembangunan yang dilakukan tidak malah merusak lingkungan itu sendiri.

Bidang kelautan dan pesisir sangat luas cakupannya dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai kegiatan dan usaha. Salah satu rencana pengembangan daerah kelautan yang perlu mendapat dukungan adalah rencana pengembangan wilayah kelautan Batam sebagai salah satu benih perikanan budi daya laut. Hal tersebut merupakan rencana program dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang memandang bahwa potensi alam laut kawasan Batam sangat memungkinkan untuk dijadikan salah satu sumber benih perikanan budi daya laut. Target produksi minimal 10 juta ekor per tahun. Produksi ini untuk memenuhi permintaan Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan bagian Barat. Menurut Made L. Nurdjana, Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya DKP sebagaimana yang dimuat dalam Bisnis Indonesia (2009), produksi benih, khususnya untuk budi daya laut, seperti kerapu, bawal, kakap

putih, dan sebagainya, saat ini masih mengandalkan dua sentra, yaitu Gondol di Provinsi Bali dan Situbondo di Provinsi Jawa Timur (Jatim). Batam berpotensi bagus untuk budidaya laut dan telah ada balai yang bisa memproduksi benih, terutama kerapu dan bawal bintang. Wilayah ini akan menjadi sumber benih yang potensial, kapasitas produksi benih secara optimal di Balai Budidaya Laut Batam hanya berkisar 3 juta-4 juta ekor per tahun. Angka tersebut lebih sering tidak tercapai karena fasilitas produksi balai tidak seluruhnya bisa digunakan untuk produksi komersial. Selain memproduksi benih, perairan Batam dengan karakter selat yang dangkal berpotensi dikembangkan menjadi pusat budi daya laut dengan berbagai jenis ikan seperti kerapu dan kakap putih. Luasnya laut yang dimiliki Batam dan Kepulauan Riau merupakan potensi yang layak dikembangkan.

Menurut Akbar, Kepala Balai Budidaya Laut DKP dalam Bisnis Indonesia (2009) Batam, 15% wilayah Batam adalah merupakan daratan dan sisanya laut. Sedangkan Kepulauan Riau 4%-6%-nya adalah daratan dan sisanya laut. Agar program yang dirancang dapat berjalan dengan baik dan usaha menjadi berkembang, hal pertama dan paling penting adalah ketersediaan benih.

Potensi pulau sekitar harus dikembangkan. pemberdayaan pulau-pulau sekitar yang sangat banyak jumlahnya harus dapat dikembangkan secara bertahap dan terencana. Pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat yang diharapkan menjadi pendorong dalam mengangkat kesejahteraan masyarakatnya. Pulau-pulau sekitar menyimpan potensi ekonomi dan pariwisata yang sangat besar jika dikembangkan sebagai pendukung dan memperkuat keberadaan pulau Batam itu sendiri. Pengembangan pulau sekitar dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pulau, karena masing-masing pulau menyimpan potensi tersendiri yang berbeda antara satu dan lainnya.

Pengembangan pulau sekitar yang memiliki potensi yang beragam harus direncanakan dari sekarang bukan berdasarkan azas kebutuhan belaka. Hal itu sesuai dengan awal pengembangan pulau Batam yang direncanakan sejak awal pengembangannya demikian pula dengan pulau-pulau sekitarnya. Apalagi pulau-pulau sekitar tidak semuanya berpenghuni tetapi masih banyak yang belum berpenghuni bahkan masih ada pulau-pulau yang belum bernama, untuk itu perencanaan pengembangan pulau sekitar harus

ditata sedemikian rupa.

Bagi pulau yang berpenghuni tentu saja pengembangannya diharapkan dapat melibatkan masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan bagi pulau yang belum berpenghuni, jika dianggap perlu dapat dilakukan transmigrasi lokal dengan merelokasi sebagian penduduk ke daerah kosong guna pengembangan kawasannya, tentu tidak semua pulau berlaku demikian disesuaikan dengan pemanfaatannya. Akan lebih baik lagi jika setiap pulau memiliki *brand* tersendiri dalam pengembangannya. Artinya setiap pulau sekitar yang belum maju ditetapkan arah pengembangannya, masing-masing pulau memiliki orientasi pengembangan misalnya; pada lingkungan, peternakan/pengembangbiakan, perikanan, pariwisata, kerajinan, penelitian, pengembangan bidang tertentu, perkampungan asli, bahkan bukan tidak mungkin jika dari sekarang ada satu pulau misalnya, yang dimanfaatkan khusus bagi satu daerah khusus pemakaman karena setiap tahun pemanfaatan lahan terus berkurang maka perlu dibuat satu kawasan makam terpadu dalam satu kawasan pulau dengan penataan dan pengelolaan yang profesional seperti yang terdapat di *San Diego Hills Memorial Park and Funeral Homes* di Jawa Barat, namun

dalam bentuk kawasan pulau yang tertata dan indah.

Melalui pemanfaatan kawasan pulau-pulau sekitar secara terencana akan menguntungkan berbagai pihak dalam rangka pembangunan daerah perbatasan tersebut. Potensi yang paling banyak dimiliki oleh pulau-pulau tersebut selain bidang kelautan adalah bidang pariwisata dengan berbagai sub bidangnya. Seperti kawasan resort/hotel, restoran, kebun binatang, taman laut, dan sebagainya. Pemanfaatan yang khusus tersebut akan lebih memfokuskan pembangunan masing-masing kawasan tersebut. Misalnya sebagai kawasan kebun binatang atau pelestarian hewan maka pengembangan satu pulau tersebut diarahkan pada hal tersebut. Pemanfaatan pulau secara terfokus bagi pulau-pulau tertentu akan menguntungkan berbagai pihak dan di sisi lain dapat bermanfaat bagi masyarakat dan wisatawan jika ingin menikmati berbagai potensi pariwisata di daerah Batam.

Sebagaimana rencana awal pengembangan pulau ini pada masa lalu, potensi tersebut juga masih luas untuk dikembangkan, tidak boleh terbuai dengan hasil yang telah dicapai. Potensi industri termasuk industri perkapalan masih terbuka lebar untuk

dikembangkan, hanya saja perlu dikuatkan lagi dengan peraturan dan kebijakan pemerintah agar investasi yang dilakukan di kawasan ini dapat diberi kemudahan dari mulai hilir hingga hulu. Artinya perlu kemudahan bagi investor dalam mengurus berbagai persyaratan dalam melakukan kegiatan usaha di daerah ini, berbagai aturan dan pajak yang kurang tepat perlu ditinjau kembali. Selain itu, tentu saja kenyamanan dan keamanan bagi investor dalam melakukan usahanya perlu tetap terjaga. Dengan demikian maka jumlah investor yang akan menanamkan modalnya di daerah ini akan terus bertambah, tidak malah lari memindahkan usaha mereka ke negara lainnya disebabkan berbagai hal yang kurang dikelola dengan baik.

Setiap tahun jumlah penduduk terus bertambah, hal itu tentu saja akan berdampak pada berbagai bidang kehidupan. Permintaan sandang pangan dan papan tentu akan terus meningkat pula. Mengatasi permasalahan jumlah penduduk telah diupayakan oleh pemerintah Kota Batam, salah satunya dengan mengeluarkan peraturan tentang kependudukan. Namun, kenyataannya jumlah penduduk terus meningkat setiap tahunnya. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk jika tidak dikelola dengan

baik, maka akan menciptakan berbagai permasalahan sosial baru dalam masyarakat. Dampak yang sudah pasti muncul dari tingginya tingkat pertumbuhan penduduk adalah permintaan akan lapangan pekerjaan. Selain itu, permintaan akan perumahan terus meningkat, sebagai akibat dari semakin banyaknya jumlah penduduk. Dampak sosial lainnya adalah, tentu saja rawannya terjadi berbagai tindak kriminal yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki pekerjaan sementara kebutuhan hidup harus dipenuhi.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan berbagai permasalahannya harus dikelola secara baik. Pemetaan penduduk dengan berbagai latar belakang sosial budaya harus dilakukan karena akan berguna sebagai pendukung arah kebijakan dan program kerja pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, dengan dimilikinya data kependudukan yang lengkap akan diketahui potensi dasar penduduk sehingga lebih memudahkan untuk mengarahkan arah pemberdayaan yang dapat dilakukan bagi mereka berdasarkan peta kependudukan yang lengkap.

Tingginya tingkat kebutuhan akan perumahan tidak bisa diabaikan begitu saja, pengadaan rumah

dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan kecil harus dapat diupayakan. Hal itu sebagai salah satu upaya dalam rangka menekan jumlah rumah liar di daerah ini. Penertiban dan relokasi terhadap rumah liar harus dilakukan secara rutin bukan berdasarkan atas permintaan atau kebutuhan lahan yang mendesak, tetapi harus dilakukan sejak dini dengan berbagai cara, misalnya sosialisasi tentang larangan berdirinya rumah liar, atau penyadaran kepada para pemilik rumah liar agar secara suka rela bersedia pindah atau direlokasi. Selain itu, berbagai fasilitas yang dimanfaatkan oleh pemilik rumah liar harus dihentikan atau jangan diberi izin seperti; listrik, air, rumah ibadah, pengurusan KTP, serta tidak membentuk satuan perangkat desa/kelurahan seperti RT/RW di daerah pemukiman rumah liar. Jika perlu menutup segala akses terhadap kawasan pemukiman rumah liar termasuk akses jalan.

Transportasi merupakan sarana penting dalam menunjang pembangunan, keberadaan transportasi umum di wilayah Batam memiliki karakteristik tersendiri berbeda dengan karakteristik wilayah daratan pada umumnya. Di wilayah ini berbagai alat transportasi umum telah tersedia, bahkan banyak

ditemui alat transportasi umum liar atau tanpa izin seperti taxi dan ojek. Keberadaan transportasi liar di satu sisi memberikan keuntungan tidak hanya bagi penumpang yang relatif lebih mudah mendapatkan fasilitas tetapi sisi lainnya dapat memberikan lahan pekerjaan tersendiri bagi mereka yang menggeluti bidang ini sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Namun sisi negatifnya, tentu saja keberadaan transportasi liar tersebut tidak terdata dan sangat rentan terjadi tindak kriminal bagi para penumpang bahkan bagi pengemudi itu sendiri. Jika terjadi sesuatu hal kepada penumpang maka akan sulit dideteksi dan ditelusuri para pelakunya karena kendaraan umum yang dinaiki tersebut adalah kendaraan umum liar tidak bernaung dalam salah satu organisasi/koperasi angkutan. Oleh sebab itu, keberadaan transportasi liar tersebut harus ditertibkan, baik melalui pengorganisasian atau penghapusan keberadaannya lewat razia-razia yang rutin dilaksanakan. Sedangkan keberadaan taxi resmi di kawasan Batam lebih bersifat monopoli terhadap daerah-daerah tertentu yang memiliki potensi penumpang lebih banyak. Penerapan argometer juga tidak berjalan dengan baik, hal itu dapat dimaklumi karena karakteristik penumpang di

daerah ini umumnya lebih banyak menuju jarak dekat sehingga penerapan argometer mengalami kendala karena di satu sisi penumpang menjadi membayar lebih mahal dibanding ongkos biasa. Disamping itu, keberadaan taxi di kawasan perbatasan ini lebih banyak digunakan sebagai angkutan umum, artinya taxi yang beroperasi terkadang mengangkut penumpang satu per satu sepanjang jalan dengan tarif bervariasi tergantung jauh dekat setiap penumpang. Dalam sekali jalan sebuah taxi bisa mengangkut hingga 6 orang penumpang dengan berbagai tujuan.

Sedangkan keberadaan transportasi umum masal seperti bus Damri jumlah armada dan rutenya masih sangat terbatas sehingga masyarakat dari berbagai jurusan dan daerah sulit mendapatkannya kecuali untuk jurusan-jurusan tertentu saja. Untuk itu, seharusnya mulai saat ini perlu dipertimbangkan untuk mengadakan angkutan umum masal yang melayani berbagai rute kawasan Batam. Keberadaan bus Damri lebih murah dan keamanan lebih terjamin sehingga pengadaan bus Damri dengan melayani berbagai rute kawasan Batam harus dipertimbangkan atau menyediakan solusi lain misalnya mengadakan jalur kereta api untuk kawasan Barat hingga Timur

pulau Batam.

Sedangkan bagi angkutan Udara dan Laut hingga saat ini belum ditemui permasalahan berarti karena berbagai armada penerbangan dan angkutan laut cukup tersedia melayani berbagai rute hingga ke berbagai daerah antar propinsi. Namun, bagi angkutan laut untuk kawasan pulau sekitar jumlahnya masih sangat terbatas hanya pada pulau-pulau tertentu saja. Padahal jika angkutan laut menuju pulau-pulau sekitar diberdayakan secara maksimal akan memberikan keuntungan bagi pengembangan kawasan dan bagi mendorong kemajuan pulau-pulau sekitarnya.

Dalam bidang perbatasan negara yang jaraknya dengan negara tetangga Singapura sangat dekat sekitar 12,5 mil laut tentu saja berbagai permasalahan menyangkut garis batas negara akan selalu muncul. Mulai dari batas laut yang selalu bergeser khususnya bagi negara tetangga yang terus-menerus berupaya menimbun kawasan pantainya untuk dijadikan daratan tentu saja berdampak pada garis batas negara tetangga yang semakin memanjang ke arah laut karena wilayah daratan mereka terus ditambah. Sehingga perlu suatu batas rill berupa patok laut sejak dini untuk memberikan batasan jelas wilayah lautan

kita agar tidak diserobot oleh negara tetangga yang memiliki teknologi lebih canggih.

Bagi wilayah pulau terluar yang tidak berpenghuni jika perlu dilakukan transmigrasi lokal pada kawasan tersebut sehingga dengan demikian pulau-pulau terluar tersebut tidak dicaplok oleh negara tetangga. Keberadaan transmigrasi lokal ke daerah pulau terluar akan memberikan keuntungan tersendiri bagi bangsa kita, selain mereka akan menjaga pulau-pulau tersebut juga sebagai salah satu upaya dalam penyebaran penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang masih kosong. Tentunya kesejahteraan para transmigrasi tersebut harus turut diperhatikan, misalnya dengan memberdayakan potensi ekonomi setempat sebagai lahan pekerjaan masyarakat.

Masyarakat pulau Batam dengan tingkat heterogenya yang sangat tinggi harus dibangun suatu kesadaran nasional atau kerukunan untuk saling menghargai satu dengan lainnya, agar tidak terjadi konflik antar suku, agama, dan ras. Perbedaan latar belakang sosial budaya para pendatang yang beraneka ragam harus dikelola dengan sebaik-baiknya, salah satunya misalnya dengan membentuk suatu organisasi kultural yang bersifat nasional dengan memberdayakan masing-masing tokoh masyarakat pendatang

dan tempatan untuk saling bekerjasama membangun kawasan ini agar tidak terjadi konflik, seandainya pun terjadi maka hal itu tidak akan berkelanjutan karena dapat diselesaikan secara cepat oleh masing-masing tokoh masyarakatnya. Membentuk suatu organisasi cultural yang bersifat nasional yang terdiri dari berbagai suku dalam satu wadah akan lebih memudahkan mengelola masyarakat yang beraneka ragam sosial budaya tersebut.

Melalui pengelolaan masyarakat kawasan perbatasan yang terintegrasi dalam suatu program yang terencana dengan baik, diharapkan dapat mempermudah pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, dan politik guna meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya. Dengan semakin baiknya tingkat kesejahteraan, diharapkan kesadaran ideologi, politik, pendidikan, hukum dan lain-lain yang menyangkut kewarganegaraan yang baik dapat dibangun, dibina dan dikembangkan. Dengan demikian diharapkan masyarakat perbatasan yang sejahtera dapat terwujud. Kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan hanya dapat dilakukan melalui suatu strategi perencanaan yang melibatkan masyarakat dari berbagai kawasan sekitar secara terpadu dan terencana.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Wilayah Batam merupakan salah satu kawasan yang daerahnya berbatasan dengan negara tetangga Singapura, bahkan beberapa pulau dalam wilayahnya termasuk dalam jejeran pulau terluar. Awalnya wilayah ini hanyalah kawasan sepi di daerah perbatasan yang berpenduduk tidak lebih dari 6000 jiwa. Pembangunan kawasan ini baru dimulai pada tahun 1970-an atas kemauan pemerintah pusat pada masa itu. Saat ini keberadaan Batam telah maju pesat, bahkan mengalahkan kawasan sekitarnya yang telah maju lebih dahulu pada dekade 70-an silam seperti Tanjungpinang dan Tanjungbalai Karimun.

Kemajuan kawasan Batam saat ini bukanlah suatu kebetulan, namun merupakan atas kemauan dari pemerintah pusat pada waktu itu dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan sehingga berbagai kendala dapat di atasi. Tanpa adanya dukungan dan kemauan dari pemerintah pusat pada waktu itu mungkin keberadaan Batam hingga kini tidak lebih seperti kawasan perbatasan lainnya di Indonesia yang

tertinggal dan sepi penuh dengan semak belukar, mungkin hanya ramai oleh para penyeludup dan pembajak kapal yang disebut dengan istilah lanun yang telah dikenal sejak masa lampau. Walau tidak dapat dipungkiri bahwa kawasan ini adalah kawasan strategis dalam jalur lintas perdagangan dunia dan berbatasan dengan negara Singapura yang maju sehingga lebih mempercepat proses pembangunan dan kemajuan di wilayah ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebenarnya setiap kawasan perbatasan memiliki potensi untuk dapat dikembangkan, sama halnya seperti kawasan Batam. Asal didukung dengan peraturan dan kebijakan untuk mempermudah berbagai investasi dan penanam modal di berbagai daerah kawasan perbatasan.

Potensi Batam dengan kekayaan kawasan pulau sekitarnya yang belum digali secara optimal akan member nilai tambah yang lebih tinggi bagi pengembangan kawasan ini di masa yang akan datang jika dikelola secara optimal. Berbagai potensi masih terpendam untuk diberdayakan guna mendukung kesejahteraan masyarakat pulau sekitarnya. Jumlah penduduknya dengan sebaran tidak merata khususnya pada daerah pulau-pulau sekitarnya, harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Kepedulian mereka

terhadap peningkatan sumber dayanya harus dapat didorong sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir dan pantai yang umumnya miskin dapat diberdayakan dan ditingkatkan kesejahteraannya. Disisi lain, masyarakat di perkotaannya dengan jumlah yang tinggi dengan berbagai latar belakang sosial budaya masyarakatnya harus dibangun suatu kesadaran sosial dengan meningkatkan rasa saling toleransi untuk saling menghargai satu dengan lainnya, agar tidak terjadi konflik antar suku, agama, dan ras.

2. Saran

Penelitian tentang Batam berkaitan dengan eksistensinya di kawasan perbatasan perlu terus dilakukan, agar diketahui lebih mendalam tentang berbagai hal menyangkut permasalahan seputar kawasan perbatasan, khususnya Batam dan Indonesia pada umumnya.

Penelitian ini hanya sebagai langkah awal dalam pemberdayaan wilayah perbatasan secara umum yang tertinggal dan terbelakang. Melalui penelitian di Batam ini, kiranya dapat dijadikan contoh dalam membangun dan membangkitkan kawasan perbatasan lainnya di Indonesia yang masih jauh dari pembangunan. Pada akhirnya diharapkan dapat men-

jadi bahan masukan baik bagi Pemerintah Kota/Kabupaten di wilayah perbatasan maupun bagi pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Batam Dalam Angka Tahun 2009. Badan Pusat Statistik Kota Batam.
- Profil Batam 2005. Pemerintah Kota Batam
- Rohana, S dan Harto, Z. 2006. *Meniti Riak Gelombang Perubahan: Kajian Mengenai Orang Melayu di Perbatasan Kepulauan Riau*. BPSNT Tanjungpinang.
- Rasyad, A. 1993. *Riau Menuju Lepas Landas*. Pemda Tk I Riau
- Novaria, S. 2010. *Sejarah Batam Masa Lalu*. <http://sosbud.kompasiana.com>
- Muchajar, J. 2009. *Kiprah 30 tahun di Batam*. <http://jokimuchajar.blogspot.com>
- Tarmansyah, US, Kol. CTP, (2009) *Potensi dan Nilai Strategis Wilayah Perbatasan Negara: Permasalahan dan solusinya*. Balitbang.dephan.go.id.
- Bisnis Indonesia (2009) dalam <http://www.indonesiaeximbank.go.id/>
- Bapeko Kota Batam. *Kebijakan Pembangunan Kawasan Perbatasan Kota Batam (Pengembangan Pulau Terluar)*. Pemerintah Kota Batam.
- Swastiwi, W. (2008). *Transportasi Laut di Kepulauan Riau 1980 – 2002 : Suatu Kajian Sejarah Maritim*. Buletin BPSNT Tanjungpinang.
- [Http://www.bapenas.go.id](http://www.bapenas.go.id)
- [Http://www.ditjen.otda.go.id](http://www.ditjen.otda.go.id)
- [Http://www.kepriprov.go.id](http://www.kepriprov.go.id)
- [Http://www.skpd.batam.co.id](http://www.skpd.batam.co.id)
- <http://www.bpbatam.go.id>

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Muhammad Zen, S.Pd
Alamat : Batam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : PNS (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam)

2. Nama : Nurmadiah, SE
Alamat : Batam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : PNS (Badan Perencanaan Pembangunan Kota Batam)

3. Nama : Hasanuddin
Alamat : Batam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pegawai Swasta

4. Nama : Laila Tani, SH
Alamat : Batam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Wiraswasta

5. Nama : Budi
Alamat : Batam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Supir Taxi

6. Nama : Sofyan
Alamat : Batam

Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Swasta

7. Nama : Syaiful
Alamat : Batam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Swasta

ISBN : 978-979-1281-43-0